



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Surabaya, **20 SEP 2019**

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya


Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196108251985031006

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021, memuat visi, misi, program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya.

Perubahan Rencana Strategis disusun dan dipergunakan sebagai acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan program lingkungan hidup dalam menentukan langkah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang berjalan sesuai dengan visi, misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaannya dengan terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru pada Dinas Lingkungan Hidup, maka dilaksanakan review Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai SOTK baru khususnya review terhadap target sasaran program yang disesuaikan dengan review target sasaran dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya.

Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan disertai dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan penyusunan, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada periode mendatang serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan di bidang Lingkungan hidup.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Strategis ini.

Surabaya, 20 SEP 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya



Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196108251985031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah	1
I.1.2. Proses Penyusunan Renstra PD.....	1
I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
I.2. Landasan Hukum	3
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD	3
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran	4
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.3.1 Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD	5
I.3.2 Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi PD	8
2.1.1 Struktur Organisasi PD	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	20
2.2.2. Sumber Daya Anggaran.....	22
2.2.3. Sarana dan Prasarana	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	39
2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD.....	39
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	42

2.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan PD	44
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.	46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/kota	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	59
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	65
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII. PENUTUP	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per Juni 2019)	20
Tabel II-2. Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pendidikan (Per-Juni 2019)	21
Tabel II-3. Komposisi Pegawai DLH Kota Surabaya berdasarkan Kedudukan dalam Organisasi (Per-Juni 2019)	21
Tabel II-4. Anggaran Belanja Daerah DLH Kota Surabaya Tahun 2015 – Juni 2019	22
Tabel II-5. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah DLH Kota Surabaya Tahun 2015 – Juni 2019	22
Tabel II-6. Daftar Perlengkapan DLH Kota Surabaya.....	25
Tabel II-7. Tabel indikator SDG's yang telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	33
Tabel II-8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 – 2019 (s.d. bulan September)	35
Tabel II-9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Surabaya (Tabel T-C.24)	36
Tabel II-10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 Berdasarkan Program (Belanja Langsung)	37
Tabel II-11. Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L	39
Tabel II-12. Komparasi capaian analisa Renstra DLH Propinsi Jawa Timur dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	41
Tabel II-13. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya	42
Tabel II-14. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur	43
Tabel II-15. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS	44
Tabel III-1. Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	46
Tabel III-2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	47
Tabel III-3. Perubahan misi RPJMD Kota Surabaya 2016 – 2021.....	48
Tabel III-4. Tabel Perubahan RPJMD 2016 – 2021 Kota Surabaya	49
Tabel III-5. Tabel Perubahan RENSTRA DLH 2016 – 2021	50
Tabel III-6. Permasalahan Pelayanan PD Kota berdasarkan analisa Renstra K/L	52

Tabel III-7. Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten/Kota Berdasarkan analisa Renstra PD Provinsi	53
Tabel III-8. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	53
Tabel III-9. Nilai Kriteria (Tabel T-B.38).....	56
Tabel IV-1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Sesuai Perubahan RPJMD 2016 – 2021 (Tabel T-C.25) .	60
Tabel V-1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum dan sesudah perubahan RPJMD 2016 – 2021 (Tabel T-C.26)	62
Tabel VI-1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebelum perubahan RPJMD 2016-2021 (Tabel T-C.27)	66
Tabel VI-2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya setelah perubahan RPJMD 2016-2021 (Tabel T-C.27)	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar II-1. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	9
Gambar II-2. Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung	23
Gambar VI-1. Keterhubungan Renstra PD dengan RPJMD.....	65

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Fungsi Renstra dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah adalah :

1. sebagai alat koordinasi pembangunan daerah yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan unit-unit kerja yang ada di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai Visi, Misi dan Tujuan PD,
2. sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan PD selama 5 tahun ke depan,
3. Sebagai bahan acuan utama atau pedoman bagi unit-unit kerja di bawah PD untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama empat tahun ke depan,
4. Sebagai alat evaluasi dalam menjalankan kegiatan operasional unit-unit kerja di lingkungan PD.

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra PD

Proses Penyusunan Renstra PD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana terdiri dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan, meliputi :
 1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 2. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal, dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD mengikuti sistematika paling sedikit memuat :
 1. pendahuluan;
 2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 3. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 4. tujuan dan sasaran;
 5. strategi dan arah kebijakan;
 6. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 7. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 8. penutup

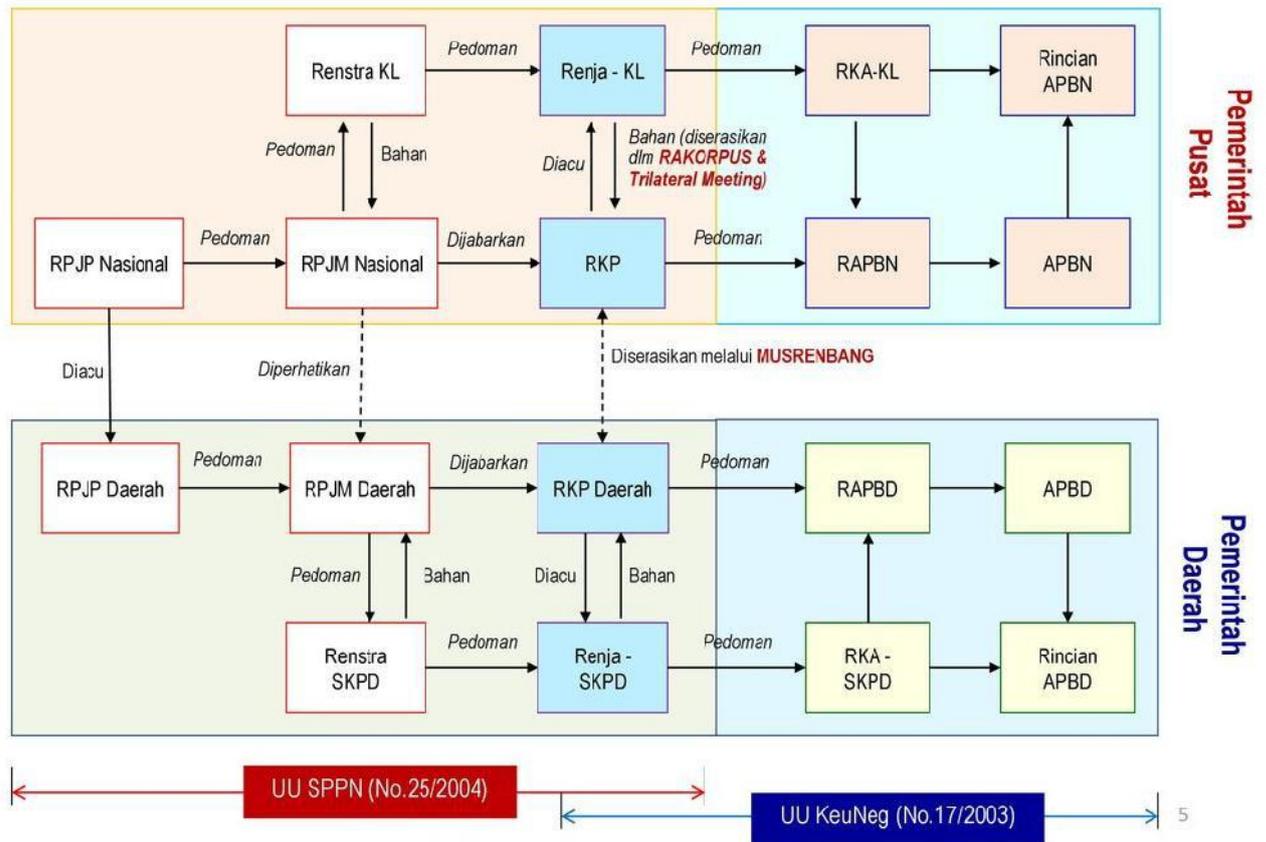
- c. penyusunan rancangan renstra, dengan cara :
 1. dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah,
 2. selanjutnya dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 3. hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
 4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara.
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, yaitu :
 1. dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA
 2. dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 3. bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah
 4. dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah
 5. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, dengan sistematika yang sama.
- f. penetapan.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya.

Keterkaitan antara renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar I-1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

Ketentuan tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) dan kewenangan dari PD adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/Sj Nomor 0430/M.Ppn/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034;

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya.
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2015;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2019;

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD

Maksud penyusunan Rankhir Perubahan Renstra DLH Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah :

1. sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup DLH Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2016-2021.
2. Dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kota Surabaya 2016 – 2021.
3. Sebagai konsekuensi dari adanya peraturan – peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/Sj Nomor 0430/M.Ppn/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
- d. Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2019;

I.3.2 Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD adalah:

1. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DLH Kota Surabaya dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program pada Perubahan RPJMD.
2. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya sesuai arah pengembangan pelayanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Renja DLH Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2020 - 2021.
4. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan DLH Kota Surabaya beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen. Isikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, terdapat pada Juknis Renstra 2016 - 2021 ini.

Ranwal Perubahan Renstra PD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
- III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.1.1 Tugas dan Fungsi PD

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.1 Struktur Organisasi PD

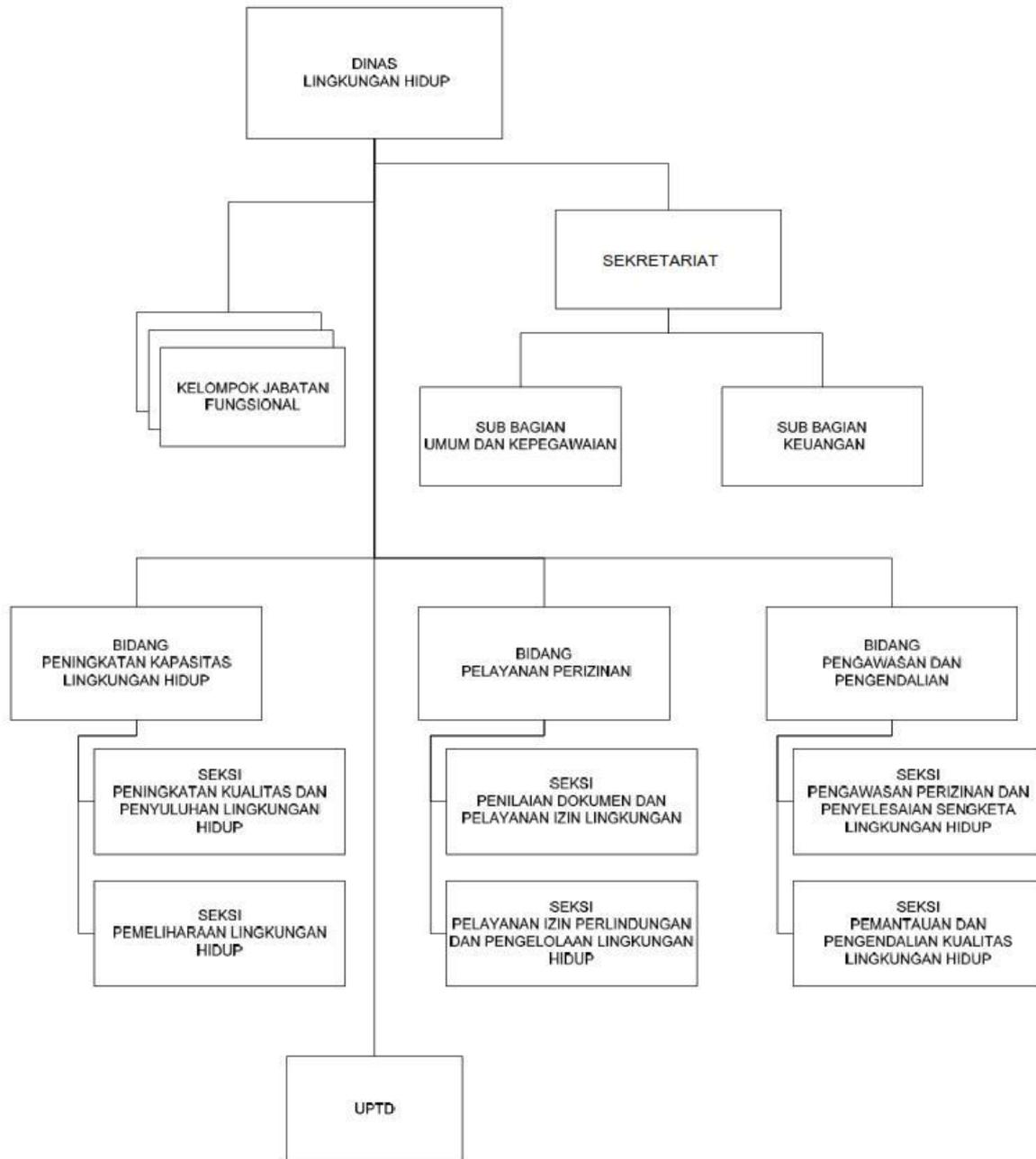
Berikut Penjelasan Mengenai Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya :

A. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
 - a) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:
 - a) Seksi Penilaian Dokumen dan Pelayanan Izin Lingkungan;
 - b) Seksi Pelayanan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengawasan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar II-1 berikut ini :



Gambar II-1. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan walikota Surabaya 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dijabarkan sebagai berikut :

1). Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program dan keuangan. Rincian tugas Sekretariat adalah

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 sub bagian (Bagian Umum dan Kepegawaian serta Bagian Keuangan) yaitu :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

B. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2). Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:

Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan kajian/analisa/rencana/kebijakan lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air;
- i. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- k. pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, karakteristik dan kondisi ekosistem;
- m. pelaksanaan pemetaan, penyusunan dokumen dan penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian dan

- pengembangan penghargaan di bidang lingkungan hidup di skala kota dan provinsi;
- p. pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
 - q. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi, dan diklat;
 - r. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - s. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
 - t. pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - u. pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - v. pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - w. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
 - x. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pembangunan jamban skala rumah tangga;
 - y. pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
 - z. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - bb. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - cc. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi 2 seksi beserta tugasnya sebagai berikut:

A. Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait lingkungan hidup;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;

7. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian dan pengembangan penghargaan di bidang lingkungan hidup di skala kota dan provinsi;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialiasi, asistensi, dan diklat;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas dan penyuluhan lingkungan hidup;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kajian/analisa/rencana/kebijakan lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
7. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
8. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, karakteristik dan kondisi ekosistem;

10. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan, penyusunan dokumen dan penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
13. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
15. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
16. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan system informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
17. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pembangunan jamban skala rumah tangga;
18. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
19. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
20. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
21. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
22. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan perizinan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan perizinan;

- e. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan lingkungan, perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pembuangan air limbah (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- g. pelaksanaan pemrosesan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- h. pelaksanaan pemrosesan izin penyimpanan sementara limbah B3;
- i. pelaksanaan pemrosesan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
- j. pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
- k. pelaksanaan penerbitan izin lingkungan;
- l. pelaksanaan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3;
- m. pelaksanaan penerbitan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
- n. pelaksanaan penerbitan izin Pembuangan Air Limbah;
- o. pelaksanaan pembinaan obyek perizinan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan membawahi 2 seksi beserta tugasnya sebagai berikut:

A. Seksi Penilaian Dokumen dan Pelayanan Izin Lingkungan, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penilaiandokumen dan pelayanan izin lingkungan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan perizinan lingkungan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
5. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin lingkungan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan obyek perizinan;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penilaian dokumen dan pelayanan izin lingkungan;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pelayanan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dengan tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
5. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pembuangan air limbah (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan izin penyimpanan sementara limbah B3;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin bagi pengumpul penyimpanan sementara limbah B3;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin Pembuangan Air Limbah;
12. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan obyek perizinan;
13. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
15. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4). Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan dan pengendalian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan usaha yang telah menerima izin lingkungan;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber tidak bergerak skala kota;
- i. pelaksanaan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- j. pelaksanaan pengawasan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
- l. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- n. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan pelayanan laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
- r. pelaksanaan pemantauan kualitas air laut dan penyusunan rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);
- s. pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
- t. pelaksanaan pemantauan/pengujian terhadap kualitas air badan air dan udara ambien;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- v. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- x. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 2 seksi yaitu :

A. Seksi Pengawasan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan usaha yang telah menerima izin lingkungan;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber tidak bergerak skala kota;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
9. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
11. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hokum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
13. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;

14. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
15. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup;
16. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
17. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
18. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
19. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
20. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan, mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air laut dan penyusunan rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);
5. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan/pengujian terhadap kualitas air badan air dan udara ambien;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
9. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5). Unit Pelaksana Teknis Dinas :

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu:

6). Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilengkapi dengan aparat sebanyak 147 orang (yang terdiri dari PNS sebanyak 53 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 94 orang). Sedangkan latar belakang pendidikan personil meliputi Sarjana Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum dan lain- lain.

Tabel II-1. Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per Juni 2019)

Status Kepeg	Unit Kerja di Dinas Lingkungan Hidup						
	Pangkat	Gol/ Ruang	Ka. DLH	Sekretariat	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Pelayanan Perizinan
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	1
2. Pembina Tk.I	IV/b	-	1	-	1	-	2
3. Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	2
4. Penata Tk. I	III/d	-	3	7	6	4	20
5. Penata	III/c	-	1	1	1	3	6
6. Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	2	3	-	5
7. Penata Muda	III/a	-	1	-	1	1	3
8. Pengatur Tk.I	II/d	-	2	1	-	-	3
9. Pengatur	II/c	-	1	2	2	2	7
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-	-	1	1
11. Pengatur Muda	I/a	-	-	-	-	-	0
12. Juru Tk. I	I/d	-	-	1	-	-	1
13. Juru	I/c	-	-	-	-	-	0
14. Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	1	1	2
15. Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	0
Total PNS	-	1	9	15	15	13	53
B. Tenaga Kontrak	-	-	14	30	22	28	94
TOTAL	-	1	23	45	37	41	147

Sumber: DLH Kota Surabaya, Juni 2019

Sampai tahun 2019, tingkat pendidikan tertinggi pegawai yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah S2 sebanyak 6 orang (11.32% dari jumlah seluruh pegawai). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S1 adalah 31 orang (58.49%), D3 2 orang (3.77%), SLTA/Sederajat 11 orang (20.75%), SMP 1 orang (1.89%), dan SD 2 orang (3.77%).

Sedangkan untuk Tenaga Kontrak, tingkat pendidikan S1 sebanyak 69 orang (73.4% dari seluruh jumlah pegawai), D3 7 orang (7.45%), D1 1 orang (1.06%), SLTA/Sederajat 17 orang (18.09%).

Tabel II-2. Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pendidikan (Per-Juni 2019)

Status Kepeg /Pangkat	Unit Kerja di Dinas Lingkungan Hidup					
	Ka. Dinas LH	Sekretariat	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	JML
1	2	3	4	5	6	8
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)						
1. S-3	-	-	-	-	-	-
2. S-2	1	2	1	1	1	6
3. S-1	-	4	10	10	7	31
4. D-4	-	-	-	-	-	-
4. D-3	-	-	1	-	1	2
5. SLTA/ Sederajat	-	3	2	3	3	11
6. SLTP/ Sederajat	-	-	1	-	-	1
7. SD	-	-	-	1	1	2
B. Tenaga Kontrak						
1. S-1	-	5	23	20	21	69
2. D-3	-	2	1	1	3	7
3. D-1	-	-	1	-	-	1
4. SLTA/ Sederajat	-	7	5	1	4	17
5. SLTP/ Sederajat	-	-	-	-	-	-
6. SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	23	45	37	41	147

Sumber: DLH Kota Surabaya, Juni 2019

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kedudukan dalam organisasi dapat dilihat dalam persebaran masing-masing di bidang-bidangnya dapat dilihat pada Tabel II-3.

Tabel II-3. Komposisi Pegawai DLH Kota Surabaya berdasarkan Kedudukan dalam Organisasi (Per-Juni 2019)

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
1. Kepala Dinas	1	-	1
2. Sekretariat	1	-	1
a. Ka Sub Umum dan Kepegawaian	-	1	1
b. Ka Sub bag Keuangan	-	1	1

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
c. Staf Pendukung (PNS + Tenaga Kontrak)	13 (4+9)	7(2+5)	20
3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1		1
a. Ka Seksi Pengawasan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		1	1
b. Ka Seksi Pemantauan dan pengendalian Kualitas lingkungan Hidup		1	1
c. Staf Pendukung (PNS + Tenaga Kontrak)	23 (7+16)	19 (5+14)	42
4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan		1	1
a. Ka Seksi Peningkatan Kualitas dan penyuluhan Lingkungan Hidup		1	1
b. Ka Seksi Pemeliharaan lingkungan Hidup		1	1
c. Staf Pendukung (PNS + Tenaga Kontrak)	20 (6+14)	14 (6+8)	34
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	1		1
a. Ka Seksi Penilaian Dokumen dan Pelayanan Izin Lingkungan		1	1
b. Ka Seksi Pelayanan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1	1
c. Staf Pendukung (PNS + Tenaga Kontrak)	18 (5+13)	20 (5+15)	38

Sumber: DLH Kota Surabaya, Juni 2019

2.2.2. Sumber Daya Anggaran

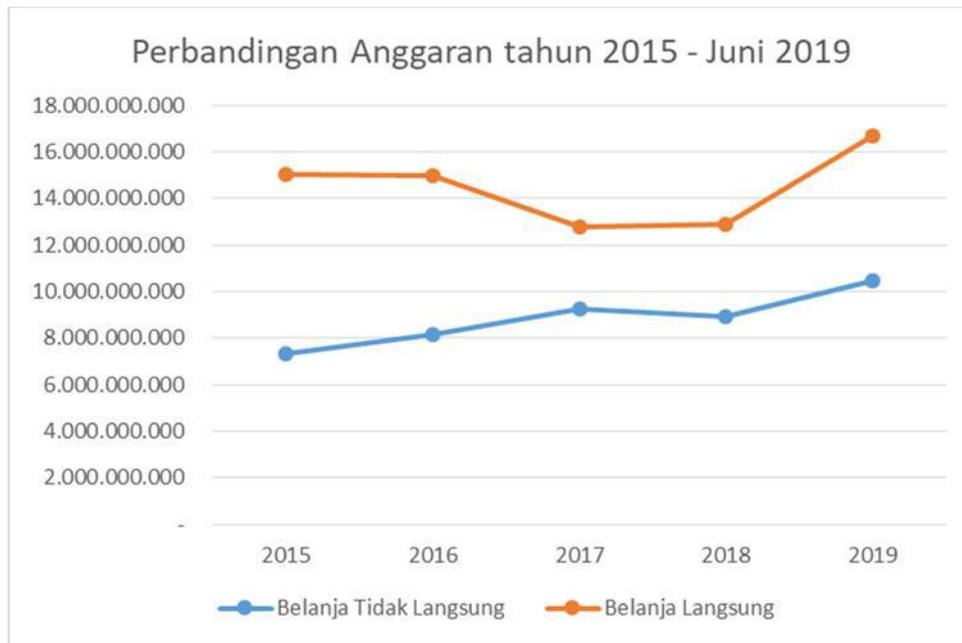
Adapun sumber daya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel II-4. Anggaran **Belanja Daerah DLH Kota Surabaya Tahun 2015 – Juni 2019**

Anggaran	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	7.350.216.941	8.169.304.455	9.266.138.623	8.928.491.351	10.449.709.263
Belanja Langsung	15.017.937.952	14.962.296.837	12.801.201.691	12.909.958.650	16.668.259.026
Pendapatan	7.865.066.000,0	6.210.505.776	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.210.505.776	-	-	-	-
Total	36.443.726.669	29.342.107.068	12.810.481.078	21.838.450.001	27.117.968.289

Tabel II-5. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah DLH Kota Surabaya Tahun 2015 – Juni 2019

Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	7.005.433.616	7.939.627.827	8.125.126.535	7.551.235.983	5.005.887.408
Belanja Langsung	12.811.756.473	13.917.826.543	11.425.981.519	12.391.360.572	5.829.900.758
Pendapatan	10.164.825.855,6	6.210.586.776	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	360.316.300	-	-	-	-
Total	30.342.332.245	28.068.041.146	19.551.108.054	19.942.596.555	10.835.788.166



Gambar II-2. Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung

Berdasarkan tren dukungan anggaran yang diperoleh DLH Kota Surabaya Tahun 2015 – 2019, apabila dikorelasikan dengan perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, tampaknya anggaran yang diperoleh DLH Kota Surabaya mengalami kenaikan tiap tahunnya. Akan tetapi untuk pendapatan berhenti sampai tahun 2016, dan dana alokasi khusus hanya sampai tahun 2015.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Sehingga, apabila dukungan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Surabaya, maka dapat dipastikan permasalahan tersebut tidak akan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Karena itu DLH perlu menerapkan strategi yang sistematis dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya, yaitu melalui upaya – upaya partisipatif dan kolaboratif baik antara instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga berperan penting untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya. Mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang harus dihadapi dan diselesaikan, maka dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang (perlengkapan) yang disajikan dalam rincian sebagai berikut :

1. Jaringan internet dan internet, sebagai media penyebaran dan pendukung pengidentifikasian data dan informasi terkait lingkungan hidup. Selain itu, akses internet juga mendukung peningkatan akses informasi dan terbukanya pengetahuan dan wawasan SDM DLH Kota Surabaya;

2. Situs web, sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi. DLH Kota Surabaya dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Kota Surabaya berkoordinasi dalam pembentukan situs web dengan alamat <http://lh.surabaya.go.id>. Dengan adanya alamat situs web tersebut, peluang DLH Kota Surabaya untuk melakukan implementasi e-Government menjadi sangat mudah. Namun, kendala yang dihadapi adalah tidak adanya personil yang ditunjuk untuk melakukan *update* informasi secara berkala pada situs web tersebut;
3. Perahu Karet, sebagai sarana pendukung pelaksanaan patroli air dan pengawasan industri terutama untuk mengawasi pengolahan limbah cair industri. Dengan adanya perahu karet, pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair industri menjadi lebih efektif, khususnya bagi industri industri yang melakukan pembuangan limbah cairnya secara ilegal yang kandungan atau konsentrasi limbah cairnya tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
4. Sumur Pantau pengadaan tahun 2003, 2004, 2005 dan 2008 di tempatkan di Jl. Jakarta Timur 11 Surabaya, Jl. Masjid Agung Timur No.2 Surabaya, Jl. Raya kali Rungkut 35, dan Kompleks perumnas Balongsari tandes Surabaya. Sumur pantau ini dibuat untuk memantau level muka air tanah, dengan adanya sumur pantau ini maka Pemerintah Daerah khususnya DLH Kota Surabaya dapat mengetahui berapa banyak air tanah pada suatu daerah cekungan penampungan air tanah yang telah di ambil. Namun kendalanya sumur pantau tidak ada pemeliharaan dan perawatan yang maksimal akhirnya sumur pantau rusak berat.
5. Tahun 2015, BLH Kota Surabaya melakukan pengadaan Solar Cell sebanyak 18 Unit tersebar di sekolah sekolah adiwiyata. Yang diperuntukan untuk penghematan energi listrik di sekolah sekolah yang berbudaya lingkungan, Pemasangan Solar Cell di sekolah adiwiyata digunakan sebagai media pembelajaran penerapan energi terbarukan. Solar cell menghasilkan 300 WP (Watt Peak), energi yang dihasilkan digunakan untuk penerangan sebanyak 5 (lima) buah lampu.

Solar Cell tersebut saat ini sudah diserahkan-terimakan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk pemeliharaannya.
6. Pembangunan Kincir Angin Hybrid Solar Cell di lokasi parkir UPTD Kenjeran pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) unit bertujuan untuk edukasi (media pembelajaran) tentang pemanfaatan energi terbarukan di Kota Surabaya. Panel Surya pada masing-masing Kincir Angin Hybrid Solar Cell menghasilkan 200 Wp (2 x 100 Wp) sedangkan Wind Turbin nya menghasilkan 300 W. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan dengan menambah 4 (empat) unit lagi Kincir Angin Hybrid Solar Cell di lokasi yang sama, sehingga total alat tersebut menjadi 8 (delapan) buah.

Kincir Angin Hybrid Solar Cell tersebut saat ini sudah diserahkan-terimakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk pemeliharannya.

Selanjutnya, untuk daftar sarana dan prasarana secara rinci yang dimiliki oleh DLH Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel II-6. Daftar Perlengkapan DLH Kota Surabaya

No	Nama Barang	Kondisi (Jumlah)		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	A.C. Split	22	3	3
2	Acces Control Pintu Fingerplus	1	2	0
3	Agitator	0	0	1
4	Air Sampler	1	0	0
5	Alat Dayung	1	0	0
6	Alat Destilasi Air Dan Alat Sampling Tanah	0	0	1
7	Alat Laboratorium	0	0	1
8	Alat Pencetak Paving	0	0	1
9	Alat Penghancur Kertas	1	1	3
10	Alat Pengukur pH Tanah	0	0	1
11	Alat Uji Bau	2	0	0
12	Alat Ukur Kadar Amoniak	4	0	0
13	Alat Ukur Kadar Nitrate	3	0	0
14	Alat Ukur Kadar Nitrite	3	0	0
15	Alat Ukur Kecepatan Angin Dan Suhu Udara	0	1	0
16	Analitical Mill	0	0	1
17	Bangunan Ipal Tahu/Tempe	0	0	1
18	Battery 3.6 V Li Cell	0	0	3
19	BBG (Konverter Kit)	0	0	1
20	BOD Meter Oxytop IS 6	0	0	1
21	Brankas	0	1	0
22	Charger HT	4	0	0
23	CO-Monitor APMA-3609022003900	0	0	25
24	CO-Monitor Pump Unit GS-6 EH-220	0	0	2
25	Conductivity Meter	0	0	2
26	CPU	0	0	1
27	Cpu Uwedat/Imi Uwedat	3	0	4
28	Current Meter	0	0	1
29	Data Display	2	0	2
30	Diafragma For Pump Unit	0	0	35
31	Digital Bottle Top Dispenser	0	0	1
32	Digital Voice Recorder	4	0	0
33	Dispenser Hot And Cool	3	1	2
34	Dispercien Cups	0	0	2
35	DO Meter (Alat Ukur Oksigen Terlarut)	4	0	1
36	Dressing Trolly	0	0	2
37	Drum Penyimpanan Limbah	0	0	5

No	Nama Barang	Kondisi (Jumlah)		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
38	Earth Ground Tester	1	0	0
39	Elemental Analysis Instruments (CHN)	0	0	15
40	Environment Meter	2	0	0
41	Exhaust Fan	9	0	5
42	Fan Humidity	0	0	1
43	Fan Untuk Sampling Udara	0	0	3
44	Faximile	1	2	1
45	Filling Besi/Metal	9	10	4
46	Filtration System (Analisa TSS)	1	0	0
47	Folding Door	1	0	0
48	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	2
49	Gas Cylinder (-N2, CO2, Udara)	0	0	2
50	Gelas Ukur	22	0	29
51	Generator	0	0	1
52	Glass Fiber Filter Tape	0	0	3
53	Glassware	0	0	1
54	Global Positioning System	9	1	
55	Hach DR900 Multiparameter Portable Colorimeter	1	0	0
56	Handy Cam	2	0	0
57	Handy Talky/Walky Talky (HT)	19	0	0
58	Handylab F1 Conductometer	1	0	0
59	Hard Disk	0	0	2
60	Hard Disk 120 Gb	0	0	1
61	Hard Disk 320 Gb	0	0	1
62	Hard Disk 750 Gb	0	0	2
63	Hard Disk External 1 Tb	6	0	1
64	Hard Disk External 2 Tb	1	0	1
65	Hard Disk External 250 Gb	2	0	0
66	Hard Disk External 320 Gb	1	0	0
67	Hard Disk External 4 Tb	2	0	0
68	Hard Disk External 500 Gb	1	0	0
69	High Volume Sampler	0	1	0
70	Instalasi Central Unit	0	0	1
71	Instalasi Remote Terminal Unit	0	0	3
72	Jartest	0	0	1
73	Kamera Digital	28	1	16
74	Komputer	78	11	2
75	Komputer Spektrophotometer UV VIS	0	0	1
76	Konektor Kabel	200	0	0
77	Kotak Pendingin Kecil	2	0	0
78	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0	0	1
79	Kursi Kerja	184	10	116
80	Kursi Tamu/Sofa	2	3	0

No	Nama Barang	Kondisi (Jumlah)		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
81	Kvm Switch LCD (4)	1	0	0
82	Lain - Lain (COD Reaktor)	0	0	1
83	Lain Lain (Portable Industrial Gas Analyser)	0	0	1
84	Lain Lain (Tabung Kasela)	0	0	1
85	Lain Lain (TDS Meter)	0	0	1
86	Lain-Lain (Digital Voice Recorder)	0	0	1
87	Lain-Lain (Motherboard Pc)	0	0	1
88	Lain-Lain (Processor P4)	0	0	1
89	Lain-Lain Alat Peraga/ Praktik Sekolah	0	0	1
90	Lambang Garuda Pancasila	2	0	0
91	Lampu UV	0	0	2
92	Laser Distance Meter	7	0	0
93	Layar Overhead Projector	1	1	0
94	LCD Proyektor	5	1	2
95	Lemari Arsip	49	17	3
96	Lemari Es	3	0	0
97	Logic Board	0	0	2
98	Megaphone 20 Watt	4	0	1
99	Meja Biro/Pimpinan	9	0	0
100	Meja Kayu/Rotan	0	0	1
101	Meja Kerja	6	4	21
102	Meja Rapat	2	0	3
103	Meja Resepsionis	2	0	0
104	Meja Telpon	1	0	0
105	Memory	0	0	2
106	Memory DDR2 1GB	2	0	0
107	Memory DDR2 2GB	2	0	0
108	Mesin Absensi Finger Print	0	0	2
109	Mesin Alat Bor Tanah	8	0	0
110	Mesin Binding	1	0	0
111	Mesin Calculator	0	0	2
112	Mesin Fotocopy Lengkap ADF	1	0	0
113	Mesin Ketik Elektronik	4	0	3
114	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	0	1	0
115	Mesin Outboard	1	0	0
116	Mesin Penghisap Debu	3	0	1
117	Meteran Roll Fiber	1	0	0
118	Midget Impinger	0	0	3
119	Mini Pump Air Tester	0	0	2
120	Mixed Gas Cylinder (SO2,NO,CO,IN N2)	0	0	1
121	Mixer	0	0	2
122	Mobil Penumpang	3	3	2
123	Modem	8	0	4

No	Nama Barang	Kondisi (Jumlah)		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
124	Modem US Robotics	0	0	10
125	Module SO2 U 801511400	0	0	2
126	Monitor +Baterai (Utk Stasiun Monitoring Udara Ambien)	3	0	0
127	Monitor LCD	9	0	2
128	Monitor LED	2	0	0
129	Motherboard PC	0	1	0
130	Multi Gas Detector	0	0	1
131	Note Book	13	0	9
132	NOx-Monitor Apna-360 UV Lamp NOx	0	0	4
133	O3-Monitor Apoa UV Lamp O3	0	0	9
134	Papan Data	0	0	25
135	Papan Tulis Elektronik	2	0	0
136	Papan Tulis/White Board	1	6	0
137	PC.Unit	0	0	12
138	Pembangkit Listrik Tenaga Surya On Grid	4	0	0
139	Pembuatan Ipal Industri	0	0	1
140	Perahu Karet Kap 6 Orang ()	1	0	0
141	Peralatan Keselamatan Kerja	0	0	1
142	Peralatan Tabung + BBG Mobil Dinas	0	0	98
143	Perlengkapan Kontrol Gas Analyser Sensor Asap	0	0	1
144	Pesawat Telephone	4	0	5
145	pH Meter	6	0	4
146	pH. Meter, Kurvet, Dan Desikator	0	0	1
147	PM10 Continous Ambient Particulate Monitor	1	0	16
148	PM10-Monitor FH62-2622000A06 Glass Fibre Filter Tape GF 10	0	0	5
149	Portabel Wireless Meeting Amplifier	1	0	0
150	Power Supply (Stasiun Monitoring Udara Ambien)	2	0	0
151	Power Supply Data Display	0	0	2
152	Printer Desk Jet Spektrofotometer	0	0	1
153	Printer Monochrome	12	0	8
154	Printer Warna	11	0	7
155	Processor P4	0	1	0
156	Pump Air Tester	0	0	3
157	Pump Kit PM10	0	0	2
158	Pump Unit GD-6EH-220	0	0	4
159	Pump Unit GS-6EH-220	0	0	6
160	Pusat Pengolaan Data (Regional Center) Perangkat Keras 1 System Dan Perangkat Lunak 1 Paket	1	0	0
161	Rack Server 42u (3)	1	0	0
162	Rain Sampler	1	0	0
163	Rak 2 Muka	8	0	0

No	Nama Barang	Kondisi (Jumlah)		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
164	Rak Besi/Metal	22	0	0
165	Rak Kayu	1	0	0
166	RCCB 5SM 314-6, 40A/30ma (1 Fase)	0	0	5
167	Reagent Dan Mini Spectrofotometer	0	0	1
168	Rol Meter	0	0	1
169	Salino Meter	0	0	1
170	Sample Filter Element	0	0	4
171	Scanner	10	0	0
172	Scanner A4	3	0	0
173	Sepeda Motor	8	5	0
174	Sepeda Motor Roda Tiga	0	0	2
175	Sepeda Statis (Sepeda Lipat)	4	0	2
176	Server	2	0	1
177	Server Enterprise (8)	1	0	0
178	SO2 Monitor Apsa Xenon - SO2 Lamp	0	0	7
179	Solenoid Nox Analyzer	0	0	5
180	Solenoid Valve (CO)	0	0	5
181	Sound Level Meter	6	0	0
182	Sseiz Filter (PM10) Lengkap Dengan Vacum Pump Dan Blender	0	0	9
183	Stabilizer	0	0	2
184	Start Piranometer	0	0	1
185	Sumur Pengamatan/Pantau	0	4	0
186	Tabung Pemadam Api	2	0	0
187	Tang Crimping	2	0	0
188	Tenda Display Uk. 3 X 3 M ()	1	0	0
189	Thermohyrometer	1	0	2
190	Thermometer Infrared ()	1	0	0
191	Timbangan	0	0	1
192	Transfer Standard ASGU-370ts ()	1	0	0
193	Trolley	4	0	0
194	Turbidity Meter	0	0	1
195	Turbidity Meter + Accessoris Calibration Kit Set	1	0	1
196	Tv	1	0	0
197	U.V Lamp (O3)	0	0	5
198	U.V Lamp (SO)	0	0	4
199	Ultrasonic Cleaner	0	0	1
200	Unit Power Supply	0	0	1
201	Unit Power Supply (UPS) 5000 Va 5u (8)	1	0	0
202	UNIT POWER SUPPLY 450watt	1	0	0
203	Unit Power Supply 800 Va	6	0	1
204	Uniterruptible Power Supply (Ups)	0	0	15
205	Vacum Pump	3	0	3

No	Nama Barang	Kondisi (Jumlah)		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
206	Van Dorn Horizontal Water Sampler (Alat Pengambil Sampel Air)	1	0	0
207	Vibration Meter (Uji Getaran)	1	0	1
208	Water Flow Meter Station	3	0	0
209	Water Sampler	2	0	2
210	Wireless (Indoor Access Multi Point)	2	0	0
211	Wireless Amplifier	1	0	0
212	Workstation	55	0	0
Jumlah		999	92	709

Sumber: DLH Kota Surabaya, Juni 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator SPM, IKK, dan MDG's berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu :

1. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 3 ayat disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

dan pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas SPM :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum;
- 4) perumahan rakyat;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Sedangkan urusan lingkungan hidup secara tidak langsung masuk pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga menjadi bagian dari SPM pekerjaan Umum.

SPM pekerjaan umum untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sehingga untuk lingkungan hidup dapat mengambil SPM penyediaan pelayanan

pengolahan air limbah domestik.

Maka pada tahun 2019 ditetapkan target capaian indikator SPM :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian			
		2018	2019	2020	2021
penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	39%	62%	85%	100%

Didasarkan pada capaian kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman tahun 2018 yaitu kelurahan yang bebas buang air sembarangan sebesar 61 kelurahan, dengan estimasi kepadatan per kelurahan adalah 20135 orang dengan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,41% per tahun, maka :

Jumlah warga Surabaya yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar : $61 * 20135 = 1.228.235$ jiwa

Jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2018 adalah = 3.100.864 jiwa.

Maka capaian indikator SPM untuk tahun 2018 adalah = $(1.228.235 : 3.100.864) * 100\% = 39,61\%$

Sehingga capaian outputnya adalah = $39.61\% : 39\% = 101,56\%$

2. Analisis IKK dan SDG's

Indikator Kinerja Kunci mengacu pada PP nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian IKK Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai target jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL:

- 1) Capaian Tahun 2016 = 100%
- 2) Capaian Tahun 2017 = 100%
- 3) Capaian Tahun 2018 = 100%

b. Penegakan hukum lingkungan:

- 1) Capaian Tahun 2016 = 75 kasus
- 2) Capaian Tahun 2017 = 54 kasus
- 3) Capaian Tahun 2018 = 67 kasus

MDG's telah digantikan oleh SDG's. Goal atau tujuan dari SDG's ada 17 yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

DLH Kota Surabaya telah menerapkan tujuan dari SDG's yaitu :

Tabel II-7. Tabel indikator SDG's yang telah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Tujuan	Target	Indikator	DLH Kota Surabaya
Tujuan 6	6.2	6.2.1.(c)	6.2.1.(c)
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat sembarang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yaitu diantaranya stop buang air besar sembarangan	dimulai tahun 2018 dengan hasil 61 kelurahan yang bebas buang air besar sembarangan, dan ditargetkan pada tahun 2019 adalah 95 kelurahan
	6.3	6.3.2.(b)	6.3.2.(b)
tujuan 7	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku (meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II)	meningkat dari tahun 57,5 (tahun 2016) menjadi 57,62 (tahun 2018)
	7.2	7.2.1	7.2.3
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	Bauran energi terbarukan	dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pemakaian energi terbarukan mencapai 421.219,3 MWH atau sekitar 1.516,39 Terra Joule, dimana pemakaian energi tidak terbarukan masih sekitar 5.767.932.477,9 Terra Joule
tujuan 12	12.4	12.4.1(a)	12.4.1(a)
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru	di Surabaya telah mencapai 20 peserta industri

Tujuan	Target	Indikator	DLH Kota Surabaya
	mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	Indikator 12.4.2.(a) Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan	12.4.2.(a) dari hasil perolehan permohonan izin penyimpanan TPS Limbah B3 yang selalu meningkat tiap tahunnya dengan total 373 kegiatan/usaha yang mendapatkan izin, maka estimasi limbah B3 yang dikelola sebesar ± 1 juta ton
Tujuan 13	13.2	13.2.1.(a)	13.2.1.(a)
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	tahun 2016 dan 2019

Tabel II-8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 – 2019 (s.d. bulan September)
(Tabel T-C.23)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional																	
		Target						Realisasi Capaian						Rasio					
		Tahun						Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019 (s.d. September)	2020	2021	2016	2017	2018	2019 (s.d. September)	2020	2021
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	N/A	62%	85%	100%	N/A	N/A	39%	0%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	0	0	0
No	Indikator	IKK/Indikator Kinerja Kunci																	
		Target						Realisasi Capaian						Rasio					
		Tahun						Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019 (s.d. September)	2020	2021	2016	2017	2018	2019 (s.d. September)	2020	2021
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	1	1	1	1	0	0
2	Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	-	-	1	1	1	1,04	0	0
No	Indikator	SDG's																	
		Target						Realisasi Capaian						Rasio					
		Tahun						Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019 (s.d. September)	2020	2021	2016	2017	2018	2019 (s.d. September)	2020	2021
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel II-9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Surabaya (Tabel T-C.24)

Uraian	Anggaran				Realisasi				Ratio antara Realisasi dan anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 s.d. Sept	2016	2017	2018	2019 s.d. Sept	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	8.169.304.455	9.266.138.623	8.928.491.351	10.449.709.263	7.939.627.827	8.125.126.535	7.551.235.983	7.732.697.698	97,19%	87,69%	84,57%	74,00%	6,35%	-0,66%
Belanja Langsung	14.962.296.837	12.801.201.691	12.909.958.650	16.668.259.026	13.917.826.543	11.425.981.519	12.391.360.572	10.490.879.850	93,02%	89,26%	95,98%	62,94%	2,74%	-6,82%
Pendapatan	6.210.505.776	-	-	-	6.210.586.776	-	-	-	100,00%					
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-						
Total	29.342.107.068	22.067.340.314	21.838.450.001	27.117.968.289	28.068.041.146	19.551.108.054	19.942.596.555	10.490.879.850						

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan dari anggaran belanja langsung dan tidak langsung mengalami kenaikan akan tetapi realisasi belanja langsung dari anggaran tersebut mengalami penurunan. Hal ini karena realisasi belanja masih dihitung sampai bulan September.

Tabel II-10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 Berdasarkan Program (Belanja Langsung)
Pemerintah Kota Surabaya

Program	Anggaran				Realisasi				Ratio antara Realisasi dan anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	N/A	N/A	N/A	3.842.507.580	N/A	N/A	N/A	1.735.307.582	N/A	N/A	N/A	45,16%	-	-
Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	11.084.048.198	7.937.212.607	7.981.006.311	8.410.302.967	10.302.034.184	6.812.271.370	7.695.141.584	5.549.286.960	92,94%	85,83%	96,42%	65,98%	-6,67%	-14,33%
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	652.392.104	N/A	N/A	N/A	642.465.020	N/A	N/A	N/A	98,48%	N/A	N/A	N/A	-	-
Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	N/A	705.642.267	568.231.747	N/A	N/A	684.087.785	556.224.762	N/A	N/A	96,95%	97,89%	N/A	-10,26%	-9,83%
Program Upaya Konservasi Energi	N/A	543.614.217	271.198.458	573.448.395	N/A	523.078.800	266.353.392	353.341.873	N/A	96,22%	98,21%	61,62%	1,80%	-12,26%
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	N/A	2.027.853.429	2.391.543.377	2.712.108.858	N/A	1.964.824.259	2.313.082.770	1.678.722.086	N/A	96,89%	23,26%	61,90%	10,18%	-5,11%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.188.819.544	N/A	N/A	N/A	1.101.159.743	N/A	N/A	N/A	92,63%	N/A	N/A	N/A	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.527.732.450	1.063.616.631	1.112.874.698	1.275.604.295	1.453.776.121	968.573.642	1.053.973.801	870.123.906	95,16%	91,06%	94,71%	68,21%	-4,41%	-12,04%

Program	Anggaran				Realisasi				Ratio antara Realisasi dan anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	509.304.541	375.221.036	420.703.861	519.870.114	418.391.475	350.816.563	356.901.723	304.097.443	82,15%	93,50%	84,83%	58,49%	0,51%	-7,67%
Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	148.041.504	164.400.198	N/A	N/A	122.329.100	149.682.540	N/A	N/A	82,63%	91,05%	N/A	5,38%	10,62%

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan untuk anggaran adalah rata-rata naik, sedangkan untuk realisasi adalah rata-rata turun.

Hal ini diketahui bahwa dengan anggaran yang diberikan, DLH mampu melaksanakan rencana kegiatannya dengan baik, dan telah memenuhi volume output. Disamping itu dikarenakan adanya perbedaan selisih harga satuan yang lebih murah di pasaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD

Tabel II -11. Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan				Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya			Hasil Analisa
No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Sasaran	Program	Kegiatan	
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)	Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum meningkat setiap tahun	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	jumlah kasus DLH yang masuk dari tahun ke tahun naik dan turun, akan tetapi penyelesaian kasus tetap mengalami peningkatan sampai 100%
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)	Indeks kualitas udara meningkat menjadi 84 di tahun 2019			Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	di tahun 2018 IKU di kota Surabaya mencapai 90,26 sehingga sudah memenuhi target IKU nasional
			Indeks kualitas air meningkat menjadi 55 di tahun 2019				di tahun 2018 IKU di kota Surabaya mencapai 57,62 sehingga sudah memenuhi target IKA nasional
		Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun			Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	dari hasil perolehan permohonan izin penyimpanan TPS Limbah B3 yang selalu meningkat tiap tahunnya dengan total 373 kegiatan/usaha yang mendapatkan izin, maka estimasi limbah B3 yang dikelola sampai tahun 2019 (s.d. Sept) sebesar ± 0.75 juta ton
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem			Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan				Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya			Hasil Analisa
No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Sasaran	Program	Kegiatan	
2	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaannya sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Planologi dan Tata Lingkungan	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	seluruh kegiatan/usaha di kota Surabaya diawasi ketaatan pengelolaan lingkungannya melalui Izin Lingkungan, Izin Pembuangan air limbah, dan Izin TPS Limbah B3. DLH melakukan kegiatan sejenis PROPER untuk 200 kegiatan/usaha yang dibina selama 5 tahun sejak 2016 sampai 2021, dengan target peningkatan 10-15% per tahun. Untuk tahun 2018 tercapai 63,5%, dan tahun 2019 ditargetkan 70%.
						Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	
						Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	
						Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun			Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	kualitas pesisir dan laut dari tahun 2016 sampai sekarang mengalami kenaikan dan fluktuatif pada kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh cuaca. selain itu dari analisa vegetasi mangrove. Hasil analisa menunjukkan vegetasi mangrove mengalami peningkatan dari tahun 2015, akan tetapi mulai mengalami penurunan pada tahun 2017 disebabkan banyaknya pencemaran yang terjadi. Secara keseluruhan, pantai utara surabaya dan pantai timur surabaya tidak mengalami blooming, dan masih cocok untuk kawasan wisata bahari.

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat sinkronisasi keterkaitan antara indikator kinerja dan sasaran renstra Kota Surabaya periode tahun 2016 – 2021 dengan sasaran renstra Kementrian Lingkungan Hidup periode tahun 2014 – 2019.

Sedangkan untuk keselarasan sasaran strategis antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel II-12. Komparasi capaian analisa Renstra DLH Propinsi Jawa Timur dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur							Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya					
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Sasaran	Indikator	Realisasi			Target
			2016	2017	2018	2019			2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	52	53	54	55	Meningkatkan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	N/A	57,5	57,62	52,68
		Indeks Kualitas Udara	89,25	89,3	89,35	89,4		Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	N/A	90,26	90,26	84,75

Dari hasil perbandingan di atas, terlihat bahwa Renstra DLH Kota Surabaya telah selaras dengan Renstra DLH Propinsi Jawa Timur dengan hasil capaian yang meningkat dari tahun 2016 sampai 2018.

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Renstra DLH Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam Renstra DLH Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034.

Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program Renstra DLH Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-13. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pengembangan Sistem Persampahan : - Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara sampah B3 di lokasi kegiatannya, yang dilakukan secara sinergis dengan sistem pengelolaan sampah B3 secara regional dan nasional	-	penyediaan TPS Limbah B3 di masing-masing usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3	mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Kota Surabaya
2	Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah 1. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan 2. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah pada industri besar dan menengah maupun industri kecil 3. Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan air limbah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 di lokasi industrinya	-	Penyediaan IPAL terpusat dan IPAL Komunal yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah kota		UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP V Tanjung Perak, UP XII Sambikerep, UP IX Ahmad Yani

Pada tabel di atas diketahui bahwa rencana struktur ruang daerah memiliki pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD

Tabel II-14. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pembentukan Sistem dan Fungsi Perwilayahan: a. Pembentukan WP berdasarkan potensi dan permasalahan b. pembentukan struktur pelayanan dan sistem kegiatan pada setiap WP c. pengembangan WP sesuai dengan fungsi dan perannya			mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	
2	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air: a. pengembangan pemanfaatan air permukaan yang meliputi sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya; b. perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung; d. peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; f. pengembangan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g. pengendalian daya rusak air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan h. penyediaan informasi sumber daya air yang meliputi informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, dan lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya				
3	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan: a. pembangunan dan pemfasilitasan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah; b. pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu antarwilayah yang dikelola secara bersama; c. pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang melayani wilayah provinsi; d. pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3; dan e. mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.				

Pada tabel di atas diketahui bahwa rencana struktur ruang provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD.

2.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan PD

Tabel II-15. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa belum ada dokumen KLHS.

Dengan demikian, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam 5 (lima) tahun mulai 2016 – 2021 untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah kota Surabaya, antara lain:

a. Tantangan :

1. Kepemilikan alas hak warga kota Surabaya terhadap tanah dan bangunan yang ditempatinya
2. Tingkat pertumbuhan penduduk;
3. Tingginya minat investasi di Kota Surabaya, sehingga banyak didirikan kegiatan/usaha;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi dan sumber daya air;
5. Posisi Surabaya berada di hilir.
6. Kondisi cuaca yang mengakibatkan kualitas air laut di pesisir kota Surabaya yang naik dan turun.
7. Menjaga kualitas udara perkotaan agar tetap memenuhi standar target Indeks Kualitas Udara Kota Surabaya.
8. Menjaga kualitas air agar tetap memenuhi target Indeks Kualitas Air.

9. Tingginya jumlah kegiatan/usaha di kota Surabaya yang sebanding dengan tingginya limbah cair dan limbah B3 yang dihasilkan.
10. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana SDM DLH Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Peluang

1. Partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan;
2. Keberadaan SSW;
3. Keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian air dan udara;
4. Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi rumah tangga
5. Keberadaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan;
6. Adanya tenaga kontrak yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan teknis dari SDM DLH Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Adanya layanan 112 atau Comm Center yang bisa melayani layanan pengaduan seluruh masyarakat Kota Surabaya.

BAB III.ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam hal identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah perlu dilakukan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III-1. Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	masih adanya warga yang belum sadar akan pentingnya pendidikan, standar hidup, dan melek huruf, meskipun menurun tiap tahunnya	pentingnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolak ukur kualitas sumber daya masyarakat Surabaya	Indeks Pembangunan Manusia di kota surabaya pada tahun 2018 IPM Surabaya sebesar 81,75
2	masih adanya masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan	Surabaya masih terkendala mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka kota Surabaya pada tahun 2018 menduduki peringkat ke-2 di Jawa Timur yaitu 6,12 setelah kota Malang sebesar 6,79
3	masih adanya rasa tidak aman di beberapa tempat di lingkungan masyarakat kota surabaya meskipun sedikit dibanding kota besar lainnya	masih adanya pelanggaran perda dan adanya kejadian anarkis	Indeks Ketertiban Dan Ketentraman kota surabaya tahun 2018 sebesar 1,73
4	masih adanya pencemaran lingkungan di kota surabaya	adanya pelanggaran dalam hal pembuangan limbah padat, cair dan udara secara sembarangan oleh beberapa kegiatan/usaha	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dan Persampahan surabaya sebesar 64,91
5	masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat di kota surabaya	adanya ketidakmerataan ekonomi atau distribusi pendapatan di antara masyarakat, artinya ada penduduk yang mampu dan ada yang tidak mampu secara ekonomi	Indeks Gini kota surabaya tahun 2018 berada pada tingkat sedang yaitu sebesar 0,375
6	Surabaya masih terbelenggu masalah kemiskinan seperti halnya di kota-kota besar di Indonesia meskipun menurun tiap tahunnya dibanding tahun sebelumnya	adanya beberapa masyarakat yang standar kehidupannya masih rendah	persentase kemiskinan di Surabaya pada tahun 2018 berada pada angka 4,88%

Dari pemetaan masalah pada Tabel III-1 di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DLH. Diantaranya adalah cepatnya pertumbuhan

industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

Sedangkan permasalahan khusus yang dihadapi oleh DLH Kota Surabaya yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus terus didalami dan diberikan solusi secara proporsional dan intens guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.

Berikut identifikasi permasalahan berdasar tuisi DLH :

Tabel III-2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Aspek Kajian Analisis gambaran pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
	(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
Layanan Perijinan Lingkungan	1. database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK	1. Tingginya jumlah kegiatan/usaha di kota Surabaya yang sebanding dengan tingginya limbah cair dan limbah B3 yang dihasilkan	Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air	2. Sarana prasarana pendukung operasional	perlunya usaha untuk menjaga kualitas air agar tetap memenuhi target Indeks Kualitas Air.	
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak,		perlunya usaha untuk menjaga kualitas udara perkotaan agar tetap memenuhi standar target Indeks Kualitas Udara Kota Surabaya.	
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup		Adanya layanan 112 atau Comm Center yang bisa melayani layanan pengaduan seluruh masyarakat Kota Surabaya	

Dari tabel di atas diketahui bahwa setiap aspek kajian memiliki pengaruh terhadap faktor internal dan eksternal terhadap kewenangan PD.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan perubahan RPJMD kota Surabaya tahun 2016 – 2021 pada tahun 2019 ini, tidak terdapat perubahan visi tapi terdapat perubahan misi dari 10 misi menjadi 7 misi yaitu :

Tabel III-3. Perubahan misi RPJMD Kota Surabaya 2016 – 2021

SEMULA		MENJADI	
MISI 1	Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	MISI 1	Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
MISI 2	Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha		
MISI 3	Memelihara keamanan dan ketertiban umum	MISI 2	Memelihara keamanan dan ketertiban umum
MISI 4	Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	MISI 3	Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
MISI 10	Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien		
MISI 6	Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	MISI 4	Memantapkan Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
MISI 7	Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional	MISI 5	Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
MISI 9	Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif		
MISI 5	Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	MISI 6	Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
MISI 8	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	MISI 7	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

DLH semula mengemban misi lama nomor 4, 5, dan 8, dengan adanya perubahan maka DLH mengemban misi nomor 3, dan 7.

Dengan adanya perubahan misi maka tujuan, sasaran kota juga mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel III-4. Tabel Perubahan RPJMD 2016 – 2021 Kota Surabaya

SEMULA			MENJADI		
MISI KOTA	TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	MISI KOTA	TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA
MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan kualitas udara dan air	MISI 3 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan kualitas udara dan air
MISI 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni			
	Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi			
	meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	NA	NA	NA
MISI 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	MISI 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik			Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sehingga tujuan, dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup menjadi :

Tabel III-5. Tabel Perubahan RENSTRA DLH 2016 – 2021

SEMULA				MENJADI			
MISI KOTA	TUJUAN DLH	SASARAN DLH	PROGRAM DLH	MISI KOTA	TUJUAN DLH	SASARAN DLH	PROGRAM DLH
MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	1. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	MISI 3 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Meningkatkan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	1. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
	NA	NA	NA				2. Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup
MISI 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Mendorong peningkatan upaya penerapan konservasi energi	Meningkatkan upaya penilaian penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	2. Program Upaya Konservasi Energi			Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	3. Program Penyediaan Sarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga
	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	mengoptimalkan pemulihan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan	3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	NA	NA	NA	NA
MISI 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan	4. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	MISI 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup	5. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup

SEMULA				MENJADI			
MISI KOTA	TUJUAN DLH	SASARAN DLH	PROGRAM DLH	MISI KOTA	TUJUAN DLH	SASARAN DLH	PROGRAM DLH
	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan				7. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/kota

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2016 - 2021 masih dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel III-6. Permasalahan Pelayanan PD Kota berdasarkan analisa Renstra K/L

Aspek Kajian Analisis renstra K/L	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
	(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
penurunan beban pencemar	1. tingginya potensi investasi di bidang sumber energi terbarukan	1. kecenderungan saat ini masih mengkonversi lahan pertanian dan hutan untuk pengembangansumber energi terbarukan	1. Tingginya minat investasi di Kota Surabaya, sehingga banyak didirikan kegiatan/usaha; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi dan sumber daya air; 3. Posisi Surabaya berada di hilir.
pengendalian kerusakan lingkungan hidup	2. tersedianya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2. otonomi daerah dan orientasi pembangunan yang bersifat sektoral dan parsial mempersulit sinkronisasi kebijakan [pengelolaan lingkungan	
peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	3. makin banyak masyarakat indonesia ikut serta dalam gerakan dukungan penanganan perubahan iklim danm gaya hidup ramah lingkungan	3. penanganan isu sosial terkait persoalan dan bencana lingkungan masih supervisial akibat rendahnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat	

Pada tabel di atas permasalahan pelayanan PD tertuang dalam sasaran jangka menengah renstra K/L.

Sedangkan dari aspek kajian analisa renstra DLH Propinsi adalah sebagai berikut :

Tabel III-7. Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten/Kota Berdasarkan analisa Renstra PD Provinsi

Aspek Kajian Analisis renstra provinsi	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
	(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
Pelayanan informasi status mutu air (100%)	1. Belum lengkapnya ketersediaan data inventarisasi potensi lingkungan hidup	1. Masih mahal teknologi pengolahan limbah	Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
Pelayanan status mutu udara (100%)	2. Masih terbatasnya tenaga teknis (Jabatan Fungsional)	3. Belum terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan UU 32/2009	
Pelayanan informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat (100)		Adanya layanan 112 atau Comm Center yang bisa melayani layanan pengaduan seluruh masyarakat Kota Surabaya	
Pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan		adanya SSW	

Pada tabel di atas permasalahan pelayanan PD tertuang dalam sasaran jangka menengah renstra Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang bertujuan untuk penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota metropolitan berbasis perdagangan dan jasa sebagai pusat pelayanan Nasional dan Internasional yang berkelanjutan sebagai bagian dari KSN Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasusila).

Tabel III-8. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Aspek Kajian Hasil telaahan RTRW	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
	(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
Tata Guna Lahan Kota Surabaya	1. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	Daya dukung dan daya tampung kota Surabaya yang semakin menurun dari tahun ke tahun
	2. tingginya tingkat pembangunan perkotaan	2. perubahan iklim yang ekstrim	
	3. nilai ekonomi lahan yang cenderung meningkat	3. semakin meningkatnya lahan kritis	
		4. tingginya tingkat pencemaran industri	
		5. tingginya tingkat alih fungsi lahan	

Dari Tabel III-6, Tabel III-7, dan Tabel III-8 dapat terlihat bahwa rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi PD memiliki permasalahan pelayanan yang sama.

Dengan adanya perubahan program seperti pada Tabel III-3 di atas maka faktor pendorong dan penghambatnya adalah :

a) Faktor pendorong, yaitu :

1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokasi usaha terhadap pentingnya perlindungan sumber mata air
2. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak akademisi dan laboratorium penguji
3. Adanya dukungan dari kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan jamban
4. Adanya percepatan rekomendasi lingkungan dan perizinan terkait lingkungan
5. Adanya peraturan terkait izin lingkungan dan izin PPLH.
6. Kepemilikan alas hak warga kota Surabaya terhadap tanah dan bangunan yang ditempatinya
7. Tingkat pertumbuhan penduduk;
8. Tingginya minat investasi di Kota Surabaya, sehingga banyak didirikan kegiatan/usaha;
9. Partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan;
10. Keberadaan SSW;
11. Keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian air dan udara;
12. Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi rumah tangga
13. Keberadaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan;
14. Adanya tenaga kontrak yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan teknis dari SDM DLH Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
15. Adanya layanan 112 atau Comm Center yang bisa melayani layanan pengaduan seluruh masyarakat Kota Surabaya

b) Faktor penghambat, yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan minimnya jabatan fungsional PPLHD;
2. Kualifikasi SDM yang tidak pas dalam penempatan tugas.
3. Keterbatasan anggaran program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
4. Minimnya jumlah IPAL Komunal dan tidak adanya pemeliharaan IPAL Komunal yang telah terbangun;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan, pengelolaan lingkungan, dan penghematan energi;

6. adanya persepsi yang berbeda dari pelaku kegiatan/usaha tentang ketaatan pengelolaan lingkungan disebabkan adanya faktor ketakutan dengan aparat dan hukum administrasi sehingga terkadang menutupi fakta yang ada;
7. Kualifikasi SDM petugas pada kegiatan/usaha tidak sesuai sehingga didapatkan informasi yang tidak lengkap atau kurang jelas;
8. Keterbatasan kemampuan pelaku kegiatan/usaha dalam pengelolaan lingkungan seperti tidak ada lahan untuk membangun IPAL, dll;
9. Tidak adanya peraturan yang tegas tentang penggunaan energi;
10. Adanya warga yang tidak memiliki alas hak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya sehingga program pembangunan jamban sulit diterapkan
11. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi dan sumber daya air;
12. Posisi Surabaya berada di hilir.
13. Kondisi cuaca yang mengakibatkan kualitas air laut di pesisir kota Surabaya yang naik dan turun.
14. Tingginya jumlah kegiatan/usaha di kota Surabaya yang sebanding dengan tingginya limbah cair dan limbah B3 yang dihasilkan.
15. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana SDM DLH Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dinilai berdasarkan beberapa kriteria dengan nilai sebagai berikut :

Tabel III-9. Nilai Kriteria (Tabel T-B.38)

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan	20	10	15	10	15	25	95
2	Tidak strategisnya posisi Surabaya berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air	20	10	15	10	15	25	95
3	Sudah adanya SSW yang menaungi perijinan satu pintu	20	10	15	10	15	25	95
4	Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan	20	10	20	10	15	25	100
5	Masih belum optimalnya Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan	20	10	20	10	15	25	100
6	Masih belum optimalnya Sarana prasarana pendukung operasional	20	10	15	10	15	25	95
7	Masih belum tersedianya database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK	20	10	20	10	15	25	100
8	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi	10	15	15	10	5	5	60
9	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban	20	15	15	20	10	10	90
10	Sumber pencemar kualitas air sungai di Surabaya berasal dari 60% limbah domestik dan 40% limbah industri	20	15	20	15	5	20	95
11	Diperlukan ketentuan mengikat yang mengatur persampahan untuk dimasukkan di substansi pengajuan permohonan izin PPLH.	15	15	20	15	15	10	90
12	Belum ada integrasi data monitoring kualitas air sungai dari data hasil pemantauan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur	15	5	15	20	5	5	65
13	Pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga dan UMKM membutuhkan solusi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya	15	10	20	15	10	10	80
14	Terbatasnya ketersediaan lahan dari warga untuk pembangunan jamban	15	15	15	20	15	5	85

Berdasarkan hasil tabel di atas dan analisa kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021 (Renstra DLH 2016 - 2021) dan potensi maupun isu strategis yang ada di provinsi Jawa Timur, dapat dirumuskan 4 (empat) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1. Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan

Pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaan lingkungan merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan sumberdaya. Ada semacam kesepakatan atau persamaan pandangan dalam masyarakat Surabaya bahwa “Peran Masyarakat” menjadi kunci utama. Dalam sistem pengelolaan ini masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimiliki, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya, serta membuat keputusan demi kesejahteraan mereka.

Dengan adanya antusias yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dapat menjadi cambuk bagi pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan mencapai target pengelolaan lingkungan yang telah disusun di dokumen RPJMD dengan hasil yang sangat memuaskan. Tentunya juga menjadi PR bagi SDM lingkungan baik masyarakat, stakeholder, maupun pemerintahan untuk menjaga Surabaya agar tetap layak huni.

2. Belum ada integrasi data monitoring kualitas air sungai dari data hasil pemantauan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur

Perangkat daerah urusan lingkungan hidup di setiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemantauan dan monitoring kualitas air sungainya atau air permukaan yang ada di setiap wilayah masing-masing, akan tetapi hal ini tidak didukung dengan adanya kerjasama dan koordinasi antar wilayah yaitu dalam hal integrasi data hasil pemantauan. Sesungguhnya dengan adanya integrasi data, maka setiap wilayah akan diuntungkan dengan berbagai kemudahan informasi terutama kontrol kualitas setiap titik sungai dan mitigasi jika terjadi masalah pencemaran. Integrasi data tersebut harus segera ditindaklanjuti mengingat banyaknya kegiatan/usaha yang telah didirikan di setiap wilayah, dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama di kota Surabaya.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi

Penghematan energi adalah unsur yang penting dari sebuah kebijakan energi. Penghematan energi menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya energi, dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi.

Selain itu, dengan mengurangi emisi, penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber-sumber tak dapat diperbaharui dengan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi, dan merupakan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi.

4. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masih banyak terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah, masyarakat masih membuang air besar sembarangan di kali atau sungai. Beberapa masyarakat di kota Surabaya yang kebanyakan yang berpenghasilan rendah juga masih melakukan hal yang sama dibanding yang berpenghasilan tinggi. Perilaku BAB sembarangan menyebabkan penyakit dan juga memperbesar risiko yang menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran strategis perangkat daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dengan adanya perubahan RPJMD kota Surabaya tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Sesuai Perubahan RPJMD 2016 – 2021
(Tabel T-C.25)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.1. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	Indikator Tujuan	1a. Indeks Kualitas Air Permukaan		N/A	57,5	57,62	52,68	57,62	57,63	
				1b. Indeks Kualitas Udara Ambien		N/A	90,26	90,26	84,75	90,27	90,28	
			Indikator Sasaran	1.1.1	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan		N/A	50%	63,50%	70%	80%	95%
				Indikator Tujuan	1c. Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	85%
		Indikator Sasaran	1.1.2	Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah kota Surabaya		N/A	N/A	39%	62%	85%	100%	
		Indikator Sasaran	1.2.1	1.2. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha		N/A	11 KU	11 KU	10 KU	10 KU	10 KU	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup	Indikator Tujuan	2. Nilai kepuasan masyarakat		N/A	76.46%	83.74%	76%	86.03%	88.31%	
			Indikator Sasaran	2.1.1	Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan		N/A	81,11%	81,18%	73%	74%	75%
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1. Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Indikator Tujuan	3. Nilai SAKIP		N/A	68,86	70,03	>60 - 70	>70 - 80	>80 - 90	
			Indikator Sasaran	3.1.1	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya		N/A	93,60%	100%	100%	100%	100%

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan perubahan Tujuan dan Sasaran sebelum dan sesudah perubahan pada RPJMD 2016 – 2021 dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu :

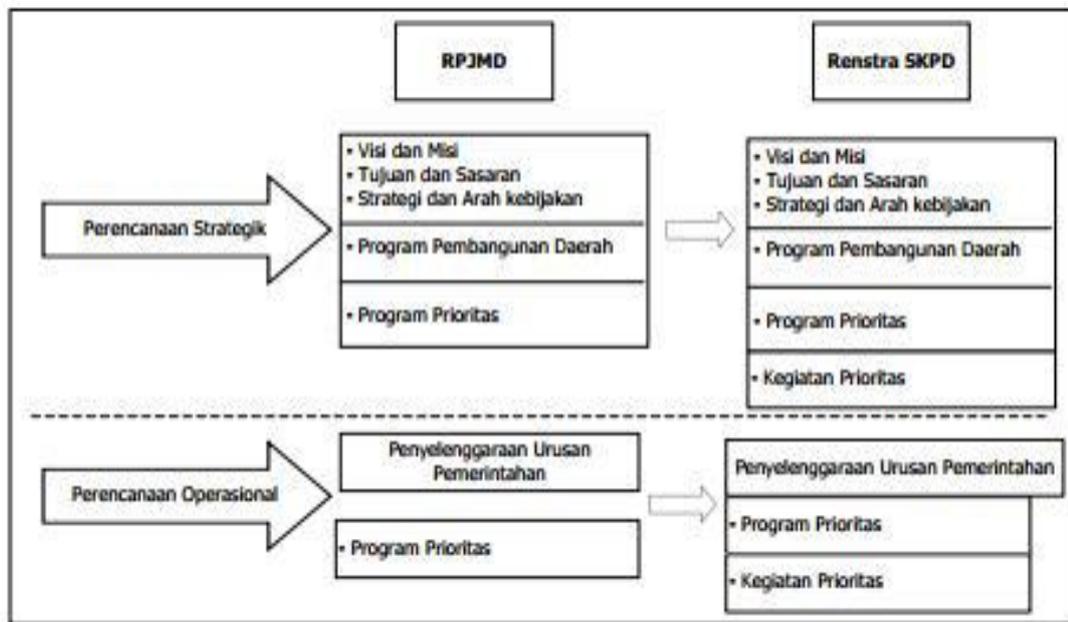
Tabel V-1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum dan sesudah perubahan RPJMD 2016 – 2021 (Tabel T-C.26)

SEMULA				MENJADI			
VISI : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi				VISI : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota				MISI 3 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3 2. melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan 3. Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat 4. Meningkatkan mengembangkan dan menerapkan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan 5. melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati 	<p>Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor</p> <p>pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup</p>	Meningkatkan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyebaran informasi dan pengetahuan upaya pelestarian lingkungan hidup 2. Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota 3. Peningkatan kualitas sarana air limbah rumah tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan daya saing kota melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekologis, sumber daya manusia berkualitas serta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat 2. Mewujudkan visi pembangunan : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

MISI 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik				MISI 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan	1.Meningkatkan pelayanan lingkungan	kualitas perijinan	Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	2. Menyediakan sarana dan prasarana peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik		Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (Surabaya Single Window)	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	1. Pemantapan daya saing kota melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekologis, sumber daya manusia berkualitas serta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat 2. Mewujudkan visi pembangunan : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance* yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas dalam RPJMD serta visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar VI-1. Keterhubungan Renstra PD dengan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel VI -1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebelum perubahan RPJMD 2016-2021 (Tabel T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	1.1.2.05.03	Program Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	Peningkatan ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	40%	50%	8685,8	60%	9613,6	70%	10660	80%	11841	95%	13177	95%	53978		
			1.1.2.05.03.0001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah lokasi pemantauan Kota Sehat/Adipura	1 dokumen	1 dokumen	253,64	1 dokumen	283,8	1 dokumen	318,83	1 dokumen	356,91	1 dokumen	401,12	5 dokumen	1614		
			1.1.2.05.03.0002	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah yang dipantau	1 dokumen	1 dokumen	270,91	1 dokumen	309,84	1 dokumen	354,43	1 dokumen	405,51	1 dokumen	464,04	5 dokumen	1805		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target			Rp (juta)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1.1.2 .05.0 3.00 03	Operasional dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	Jumlah laporan pengadaan dan pemeliharaan peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien	1 paket	1 paket	3054,1	1 paket	3290,2	1 paket	3550,9	1 paket	3839,2	1 paket	4158,4	5 paket	17893		
			1.1.2 .05.0 3.00 04	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	161 kali	1741,3	161 kali	2014,9	161 kali	2332,5	161 kali	2701,4	161 kali	3130,2	805 kali	11920		
			1.1.2 .05.0 3.00 05	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah peserta pelaksanaan pendidikan lingkungan	500 peserta	500 peserta	156,9	500 peserta	174,51	500 peserta	194,43	500 peserta	217,02	500 peserta	242,71	2500 peserta	985,6		
			1.1.2 .05.0 3.00 06	Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Jumlah Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut	32 sample	32 sample	251,32	32 sample	273,02	32 sample	296,62	32 sample	322,27	32 sample	350,47	160 sample	1494		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1.1.2 .05.0 3.00 07	Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Jumlah Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI) yang dipelihara	2 dokumen	2 dokumen	442,19	2 dokumen	504,91	2 dokumen	576,57	2 dokumen	658,42	2 dokumen	751,93	10 dokumen	2934		
			1.1.2 .05.0 3.00 08	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	75 kasus	363,07	75 kasus	394,36	75 kasus	428,44	75 kasus	465,49	75 kasus	505,79	75 kasus	2157		
			1.1.2 .05.0 3.00 09	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah uji untuk hasil pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	614 sample	614 sample	1526,7	614 sample	1658,6	614 sample	1801,9	614 sample	1957,8	614 sample	2127,2	3070 sample	9072		
			1.1.2 .05.0 3.00 10	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah pelajar/ siswa yang mendapatkan edukasi di bidang lingkungan	300 orang	300 orang	485,05	300 orang	550,93	300 orang	627,04	300 orang	715,13	300 orang	817,25	1500 orang	3195		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target			Rp (juta)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			1.1.2.05.03.0011	Sosialisasi dan Pemantauan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha yang dipantau dan diberikan sosialisasi	40 lembaga	40 lembaga	140,65	40 lembaga	158,56	40 lembaga	178,91	40 lembaga	202,04	40 lembaga	228,35	200 lembaga	908,5		
Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	mengoptimalkan pemulihan kualitas lingkungan dalam memanfaatkan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan	persebaran lokasi yang memanfaatkan energi baru terbarukan dan efisiensi energi	1.2.2.05.011	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	29 Unit	29 Unit		33 unit		37 unit		41 unit		45 unit		49 unit			
					Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	4 lokasi	4 lokasi	529,49	6 lokasi	548,89	8 lokasi	569	10 lokasi	589,85	12 lokasi	611,46	14 lokasi	2849		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target			Rp (juta)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		persebaran lingkungan yang mengembangkan dan memanfaatkan energi alternatif yang dilakukan	1.2.2.05.01.001	Kegiatan :Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	1 unit	1 unit	529,49	1 unit	548,89	1 unit	569	1 unit	589,85	1 unit	611,46	5 unit	2849		
	Meningkatkan upaya penilaian penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	1.2.2.05.02	Program Upaya Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang telah menerapkan konservasi energi	113 ku	113 ku	277,9	123 ku	303,69	133 ku	334,11	143 ku	370,01	153 ku	412,45	163 ku	1698		
			1.2.2.05.02.001	Kegiatan :Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	1 dokumen	1 dokumen	277,9	1 dokumen	303,69	1 dokumen	334,11	1 dokumen	370,01	1 dokumen	412,45	5 dokumen	1698		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan	Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang	2.1.2.03.08	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	72%	4711,6	74%	5361,4	76%	6102,9	78%	6958,2	80%	7925,6	80%	31060		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target			Rp (juta)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
	di bidang lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan	lingkungan hidup yang diselesaikan	2.1.2.03.08.0006	Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah ijin gangguan dan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	0 berkas	500 berkas	4209,2	500 berkas	4799,6	500 berkas	5474	500 berkas	6244,4	500 berkas	7124,6	2500 berkas	27852		
			2.1.2.03.08.0007	Pelayanan Perijinan Pembuangan Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	0 izin	26 izin	263,43	26 izin	295	26 izin	330,66	26 izin	370,93	26 izin	416,45	130 izin	1676		
			2.1.2.03.08.0008	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	0 berkas	30 berkas	239,03	30 berkas	266,84	30 berkas	298,25	30 berkas	342,85	30 berkas	384,47	150 berkas	1531		
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi	2.2.2.02.002	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	350,25	100%	352,71	100%	406,19	100%	468,64	100%	541,61	100%	2119		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
yang baik	perangkat daerah	Perkantoran Perangkat Daerah		Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			2.2.2.02.02.00.05	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	100%	100%	350,25	100%	352,71	100%	406,19	100%	468,64	100%	541,61	100%	2119		
			2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	72%	1142,6	74%	1119	76%	1119	78%	1119	80%	1119	80%	5618		
			2.2.2.02.01.00.05	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	0 jenis	9 jenis	1142,6	9 jenis	1119	45 jenis	5618								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	60%	100%	48,7	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	48,7		
			2.1.2.01.02.0006	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis		9 Dokumen	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dan berikut adalah Rencana Program dan kegiatan setelah adanya perubahan RPJMD 2016 – 2021

Tabel VI-2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya setelah perubahan RPJMD 2016-2021 (Tabel T-C.27)

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi				
						2016	2017	2018		2020		2021		Target	Rp						
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
1	Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air				Indeks Kualitas Air Permukaan	54,9	57,5	57,62	52,68	57,62	8.893.635.628	57,63	9.059.720.137	57,63	17.953.355.765	DLH	kota Surabaya				
					Indeks Kualitas Udara Ambien	89,57	90,26	90,26	84,75	90,27		90,28		90,28		DLH					
					Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	80%		85%		85%		DLH					
					1.1. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air				Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	N/A	50%	63,50%	70%	80%		95%		95%		DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
									Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	62%	85%		100%		100%		DLH	kota Surabaya
			1.1.1.	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	N/A	50%	63,50%	70%	80%	3.692.461.395	95%	3.735.332.680	95%	7.427.794.075	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.1.	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	N/A	N/A	250 sampel	50 lokasi	178 lokasi	331.42 8.748	178 lokasi	364.57 1.623	178 lokasi	696.00 0.371	DLH	Lokasi IPAL komunal
			1.1.	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	54 kasus	67 kasus	50 obyek	50 obyek	539.23 1.848	50 obyek	593.15 5.033	50 obyek	1.132.3 86.881	DLH	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak
			1.1.	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	370 sampel	218 sampel	53 KU	254 lembaga	254 lembaga	988.57 5.558	254 lembaga	1.087.4 33.114	254 lembaga	2.076.0 08.672	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
			1.1.	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	58 sampel	NA	NA	224 sampel	224 sampel	400.19 6.499	224 sampel	440.21 6.149	224 sampel	840.41 2.648	DLH	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Rp	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.1. 1.5.	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat	32 sampel	NA	48 sampel	48 sampel	778 data	461.220.572	778 data	507.342.629	778 data	968.563.201	DLH	Perairan Pesisir di Kota Surabaya
			1.1. 1.6.	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	1 unit	N/A	N/A	2 unit	365 data	971.808.170	365 data	1.068.988.987	365 data	2.040.797.157	DLH	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari
			1.1. 2.	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.317.604.955	100%	3.363.331.084	100%	6.680.936.039	DLH	
					Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungannya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00 %			75%		75%		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.1.2.1. Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	7 dokumen	1.180.192.157	7 dokumen	1.298.211.373	7 dokumen	2.478.403.530	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
				1.1.2.2. Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	N/A	N/A	N/A	6 kali	12 kali	706.206.435	12 kali	776.827.079	12 kali	1.483.033.514	DLH	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus
				1.1.1.3. Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	157 kali	160 kali	151 kali	160 kali	113 kali	1.431.206.363	113 kali	1.574.326.999	113 kali	3.005.533.362	DLH	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kertajaya
				2.1. Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A	1000 lokasi	80%	1.883.569.278	85%	1.961.056.373	85%	3.844.625.651	DLH	kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.1.1.	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	N/A	N/A	N/A	1000 lokasi	400 unit	1.883.569.278	400 unit	1.961.056.373	400 unit	3.844.625.651	DLH	
		1.2. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha			tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	N/A	11 KU	11 KU	10 KU	10 KU		10 KU		10 KU		DLH	
			3.1.1.	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	125 kegiatan dan/atau usaha	245 kegiatan dan/atau usaha	144 kegiatan dan/atau usaha	154 kegiatan dan/atau usaha	552.055.406	164 kegiatan dan/atau usaha	559.604.220	164	1.111.659.626	DLH	
			3.1.1.1.	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	N/A	120 KU	120 KU	120 lembaga	120 lembaga	552.055.406	120 lembaga	607.260.947	120 lembaga	1.159.316.353	DLH	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai kepuasan masyarakat	N/A	76,46 %	83,74 %	76%	86,03 %	112.977.819.800	88,31 %	114.803.442.594	88,31 %	227.781.262.394	DLH	
		2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan			Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	N/A	81,11 %	81,18 %		73%		74%		75%		DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		publik lingkup lingkungan hidup	4.1.1.	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	78%	2.597.705.736	80%	2.632.368.391	80%	5.230.074.127	DLH	
			4.1.1.1.	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan Izin lingkungan yang diterbitkan	1774 rekomendasi	1578 berkas	1671 berkas	800 berkas	1.600 berkas	1.598.647.171	1.600 berkas	1.619.978.823	1.600 berkas	3.218.625.994	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
			4.1.1.2.	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	84 permohonan	79 izin	95 izin	50 izin	50 izin	406.745.623	50 izin	412.173.060	50 izin	818.918.683	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
			4.1.1.3.	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	64 KU	61 berkas	143 izin	45 izin	45 izin	592.312.942	45 izin	600.216.508	45 izin	1.192.529.450	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Nilai SAKIP	N/A	68,86	70,03	>60-70	>70-80	5.135.507.410	>80-90	5.207.525.799	>80-90	10.343.033.209	DLH	
		3.1. Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan			Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya	N/A	93,60%	100%	100%	100%	1.624.862.060	100%	1.647.150.855	100%	3.272.012.915	DLH	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		kegiatan pembangunan	5.1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	67,94 %	82,61 %	76%	87%	1.196.809.895	88%	1.316.490.885	88%	2.513.300.780	DLH	
			5.1.1.1.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	92,51 %	N/A	110%	100%	100%	1.196.809.895	100%	1.316.490.885	100%	2.513.300.780	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
			5.1.2.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	100%	99,11 %	100%	100%	428.052.165	100%	470.857.382	100%	898.909.547	DLH	
					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	92,84 %	100,00 %	100%	100%		100%		100%		DLH	
			5.1.1.1.	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	100%	100%	428.052.165	100%	470.857.382	100%	898.909.547	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

A. Rencana program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

B. Indikator kinerja

Indikator kinerja memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Tahun 2016-2021.

C. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan Perubahan Renstra tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah pemangku kepentingan Lingkungan hidup termasuk aparatur, pelaku kegiatan/usaha, lembaga, masyarakat dan para pelajar.

D. Pendanaan Indikatif

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mendapatkan dana dari APBD Kota Surabaya. Hal tersebut termuat dalam Tabel VI-1 dan Tabel VI-2

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, dimana Indikator Kinerja Utama merupakan indikator tujuan kota, sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator sasaran kota yang menjadi tujuan dari Perangkat Daerah.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan;
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD 2016 – 2021 yaitu :

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2016 – 2021 (Tabel T-C.28)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD						Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016		2017		2018			2019	2020	
		Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi				
Indikator Tujuan											
1	Indeks Kualitas Air Permukaan	N/A	N/A	51,88	57,5	52,28	57,62	52,68	57,62	57,63	57,63
2	Indeks Kualitas Udara Ambien	N/A	N/A	84,25	90,26	84,5	90,26	84,75	90,27	90,28	90,28
3	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	85%	85%
4	Nilai kepuasan masyarakat	N/A	N/A	76%	76.46%	76%	83.74%	76%	86,03%	88,31%	88,31%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD						Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	
		Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi				
5	Nilai SAKIP	N/A	N/A	>60 - 70	68,86	>60 - 70	70,03	>60 - 70	>70 - 80	>80 - 90	>80 - 90
Indikator Sasaran											
1	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	50%	50%	60%	63,50%	70%	80%	95%	95%
2	Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	100%	100%
3	tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	N/A	N/A	10KU	11 KU	10KU	11 KU	10 KU	10 KU	10 KU	10 KU
4	Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	N/A	N/A	71%	81,11%	72%	81,18%	73%	74%	75%	75%
5	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	100%	93,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu diikutberatkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang selama ini. Indikator kinerja Utama yang ditetapkan harus dapat mendiskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Fokus Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditetapkan oleh Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan komponen SPM Bidang lingkungan Hidup, maka IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang ditetapkan dan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja tahunan.

BAB VIII. PENUTUP

Memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Surabaya

Dengan adanya perubahan RPJMD, maka diikuti juga perubahan RENSTRA PD tahun 2016 - 2021 sebagai acuan pembuatan RENJA PD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini diharapkan dapat berjalan secara sinergis untuk menuju Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang lebih baik sebagai kota jasa perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan yang dititik beratkan pada pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di darat, laut dan udara.

Selanjutnya dengan adanya pengesahan dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 maka digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja tahunan.

LAMPIRAN

- ❖ Berita Acara Forum Perangkat Daerah Lintas Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.

BERITA ACARA

Nomor : 660/12596/436.7.12/2019

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Perubahan Renstra 2016 – 2021 Dinas Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019

Jam : 09.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya :

MENYEPAKATI :

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2020 – 2021 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Tanggal 20 Agustus 2019

Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pimpinan Sidang Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya



[Handwritten signature]
Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196108251985031006

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Kresnayana Yahya			<i>[Handwritten signature]</i>
2	Magdalena P	BKM Rukun Abadi	Jl. Simamulyo 1/50	<i>[Handwritten signature]</i>
3	S. Sulco Indus.	Korwil Utara	Jl. I (Kem Klapan) / 20	<i>[Handwritten signature]</i>
4	Rosikhin	Korwil Sey-bra	Jl. BT V/22	<i>[Handwritten signature]</i>
5	Prahmana Riz	Korwil Selatan	Jl. Karah Agung 1/50	<i>[Handwritten signature]</i>
6	Moh. Nizomudin	DLH prov Jember	Wisata Menanggal 38	<i>[Handwritten signature]</i>
7	Ryan C	Bappeko		<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN I

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 660/12596/436.7.12/2019

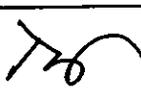
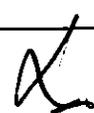
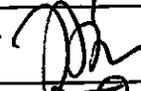
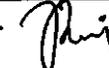
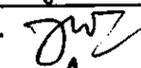
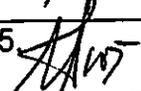
TANGGAL : 20 AUG 2019

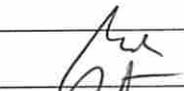
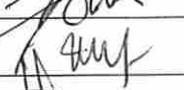
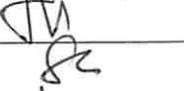
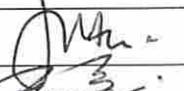
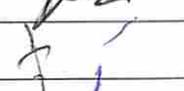
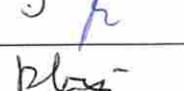
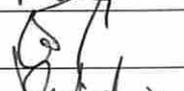
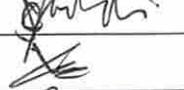
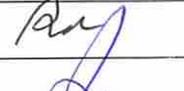
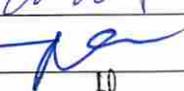
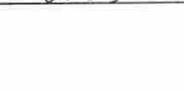
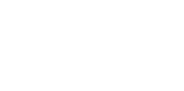
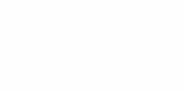
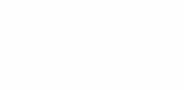
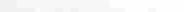
Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup
Kota Surabaya

Tanggal : 20 Agustus 2019

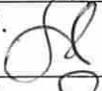
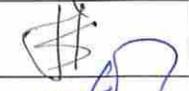
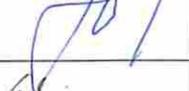
Tempat : Ruang Rapat Dinas
Lingkungan Hidup

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
1.	Moh. Nizamudin	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim		1. 
2.		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		2. 
3.	Ryza C	Badan Perencanaan Pembangunan		3. 
4.	Eko S	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		4. 
5.	NING SARI	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	0817 036 70214	5. 
6.	Wahyu I	Dinas Pendidikan	08155 119053	6. 
7.	Febri	Dinas Kesehatan	0857459 16026	7. 
8.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		8.
9.	ARKA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	0856 3383925	9. 
10.		Satuan Polisi Pamong Praja		10.
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	JANNI	Kecamatan Krembangan	081357556 394	12. 
13.		Kecamatan PabeanCantian		13.
14.	Wahjoe. S	Kecamatan Sukomanunggal	Simodulyo I/31	14. 
15.	AMBAR. W	Kecamatan Wonocolo	7C JEMUR SARI II-33A	15. 

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN DALAM SIDANG KELOMPOK	TANDA TANGAN
16.	MOEDJI ta'at	Kelurahan Perak Utara		16. 
17.	MOCH Anas	Kelurahan Morokrembangan	0899384 7916	17. 
18.	Sufrenu Yusuf	Kelurahan Simo Mulyo	08123218 112	18. 
19.		Kelurahan Jemur Wonosari		19.
20.		Kelurahan Margorejo		20.
21.	Ir. Maz Tri Indrawanto, M. SP	Tenaga ahli perencanaan tata bangunan	0856 67947510	21. 
22.	Alfan Purnomo, ST, MT	Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan ITS		22. 
23.	Elieser Tarigan, Ph. D	Universitas Surabaya		23. 
24.	Fenny	BKM Rukun Abadi	082336540396	24. 
25.		Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia		25.
26.		Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia		26.
27.	Kresnawati Yahya	Asosiasi Pengelola Koordinator Belanja Indonesia	0811334260	27. 
28.	FIRMAN S	Perum Jasa Tirta I		28. 
29.	Sri	Faskel Korwil Utara	0856 459 65855	29. 
30.	Prahmana Rizki	Faskel Korwil Selatan	081 330214 696	30. 
31.	H. Rosthin	Faskel Korwil Barat	081 330 372 369	31. 
32.	ARIEF	PJTI		32. 
33.	RPKI	morokrembangan	0899384 7916	33. 
34.	Novi	BKM Rukun Abadi		34. 
35.	Magdalena	BKM Rukun Abadi	081 333 070716	35. 

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN DALAM SIDANG KELOMPOK	TANDA TANGAN
36.	Chamitha	DLH		36. 
37.	Tiorina	DLH		37. 
38.	Okta	PU		38. 
39.	Myrna	DLH		39. 
40.	Sri Fatmunningsih	DLH		40. 
41.	Shinda	LH		41. 
42.	Justina	LH		42. 
43.	M. Yusuf	DLH		43. 
44.	Dyan P	DLH		44. 
45.	SRI WAHONO	DLH		45. 
46.	Tri DROSTO	LH		46. 
47.	Ulfi	LH		47. 
48.	ENY	DLH		48. 
49.	Dhani	LH		49. 
50.	Xibowd	LH		50. 
51.	Sofyan	LH		51. 
52.	Yudis	LH		52. 
53.	Dyas	DLH		53. 
54.	Rizal	DLH		54. 
55.	Widya	DLH		55. 
56.	ELMI-F	DLH PROV		56. 
57.	Ariya W	DLH		57. 
58.	Eko Agus	DLH		58. 
59.	Cahyaning	DLH		59.
60.	Praburi	DLH		60.

PEKO

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
61.	M. PATRICKURROZI	LH		61. 
62.	DJEMADI	LH		62. 
63.	Bagus	DLH		63. 
64.	Trias	DLH		64. 
65.	SIDDIQ	DLH		65. 
66.	JARIM	DLH		66. 
67.	Teguh	LH		67. 
68.	Suryo	LH		68. 
69.	Rohmi N	DLH		69. 
70.	Eliyanr	LH		70. 
71.	Dewi S	LH		71. 
72.	Anisna	LH		72. 
73.	Wiwini	LH		73. 
74.				74.
75.				75.

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 660/12596/436.7.12/2019

TANGGAL : 20 AUG 2019

Tanggal : 20 Agustus 2019

Tempat : Ruang Rapat DLH Kota Surabaya

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah Dinas Lingkungan Hidup terhadap

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021

Kota Surabaya

ISU STRATEGIS :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan
2. Tidak strategisnya Posisi Surabaya berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air
3. Sudah adanya SSW yang menaungi perijinan satu pintu
4. Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan
5. Semakin banyaknya keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian udara
6. Masih belum optimalnya Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan
7. Masih belum optimalnya Sarana prasarana pendukung operasional
8. Masih belum tersedianya database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK
9. Tersedianya Dasar hukum /kebijakan dan kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan LH dan penerbitan izin TPS LB3 dan Pengumpulan LB3 skala kota
10. Tersedianya SOP pelayanan perizinan dan dokumen Lingkungan Hidup
11. Telah adanya Stasiun monitoring udara ambien
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi
13. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban
14. Sumber pencemar kualitas air sungai di Surabaya berasal dari 60% limbah domestik dan 40% limbah industri
15. Diperlukan adanya ketentuan mengikat yang mengatur persampahan untuk dimasukkan di substansi pengajuan permohonan izin PPLH.
16. Diperlukan integrasi data monitoring kualitas air sungai dari data hasil pemantauan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur
17. Pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga dan UMKM membutuhkan solusi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya
18. Terbatasnya ketersediaan lahan dari warga untuk pembangunan jamban

VISI : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

MISI 3 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	1. melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan	Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup
		2. Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	
		3. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3	
		4. melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		5. Meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati	
	6. membentuk kelompok swadaya masyarakat sebagai alat koordinasi dan pelaksana pembangunan jamban	peningkatan sarana prasarana sanitasi pada kawasan perumahan dan permukiman	
	7. penerbitan Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tentang Daftar Calon Penerima Jamban di Kota Surabaya		
Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	1. melakukan audit energi gedung (gedung pemerintah, dan swasta) dan audit energi proses (di industri)	peningkatan penghematan energi di kota Surabaya	
	2. penerbitan instruksi walikota untuk penerapan penghematan energi di sektor pemerintah Kota Surabaya, BUMD, BUMN, dan swasta		

MISI 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup	mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan terkait lingkungan hidup	Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup melalui pelayanan terpadu
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Menyediakan sarana dan prasarana peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik	peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

LAMPIRAN III

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 660/12596/436-7.12/2019
TANGGAL : 20 AUG 2019

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap Program Dan Kegiatan Prioritas Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021

Kota Surabaya

Tanggal : 20 Agustus 2019

Tempat : Ruang Rapat DLH Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air				Indeks Kualitas Air Permukaan	54,9	57,5	57,62	52,68	57,62	8.893.635.628	57,63	9.059.720.137	57,63	17.953.355.765	DLH	kota Surabaya
					Indeks Kualitas Udara Ambien	89,57	90,26	90,26	84,75	90,27		90,28		90,28		DLH	
					Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	80%		85%		85%		DLH	
	1.1. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air				Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	N/A	50%	63,50 %	70%	80%		95%		95%		DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
					Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	62%	85%		100%		100%		DLH	kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.1.	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	N/A	50%	63,50 %	70%	80%	3.692.461.395	95%	3.735.332.680	95%	7.427.794.075	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
			1.1.1.	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	N/A	N/A	250 sampel	50 lokasi	178 lokasi	331.428.748	178 lokasi	364.571.623	178 lokasi	696.000.371	DLH	Lokasi IPAL komunal
			1.1.1.2.	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	54 kasus	67 kasus	50 obyek	50 obyek	539.231.848	50 obyek	593.155.033	50 obyek	1.132.386.881	DLH	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak
			1.1.1.3.	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	370 sampel	218 sampel	53 KU	254 lembaga	254 lembaga	988.575.558	254 lembaga	1.087.433.114	254 lembaga	2.076.008.672	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
			1.1.1.4.	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	58 sampel	NA	NA	224 sampel	224 sampel	400.196.499	224 sampel	440.216.149	224 sampel	840.412.648	DLH	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	Surabaya
				1.1. 1.5.	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat	32 sampel	NA	48 sampel	48 sampel	778 data	461.220.572	778 data	507.342.629	778 data	968.563.201	DLH	Perairan Pesisir di Kota Surabaya
				1.1. 1.6.	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	1 unit	N/A	N/A	2 unit	365 data	971.808.170	365 data	1.068.988.987	365 data	2.040.797.157	DLH	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari
				1.1. 2.	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.317.604.955	100%	3.363.331.084	100%	6.680.936.039	DLH	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target		Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00 %		75%		75%		DLH	
			1.1. 2.1.	Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	7 dokumen	1.180.192.157	7 dokumen	1.298.211.373	7 dokumen	2.478.403.530	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
			1.1. 2.2.	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	N/A	N/A	N/A	6 kali	12 kali	706.206.435	12 kali	776.827.079	12 kali	1.483.033.514	DLH	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus
			1.1. 1.3.	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	157 kali	160 kali	151 kali	160 kali	113 kali	1.431.206.363	113 kali	1.574.326.999	113 kali	3.005.533.362	DLH	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kertajaya
			2.1.	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A	1000 lokasi	80%	1.883.569.278	85%	1.961.056.373	85%	3.844.625.651	DLH	kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.1.1.	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	N/A	N/A	N/A	1000 lokasi	400 unit	1.883.569.278	400 unit	1.961.056.373	400 unit	3.844.625.651	DLH	
		1.2. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha			tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	N/A	11 KU	11 KU	10 KU	10 KU		10 KU		10 KU		DLH	
			3.1.1.	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	125 kegiatan dan /atau usaha	245 kegiatan dan /atau usaha	144 kegiatan dan /atau usaha	154 kegiatan dan /atau usaha	552.055.406	164 kegiatan dan /atau usaha	559.604.220	164	1.111.659.626	DLH	
			3.1.1.	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	N/A	120 KU	120 KU	120 lembaga	120 lembaga	552.055.406	120 lembaga	607.260.947	120 lembaga	1.159.316.353	DLH	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai kepuasan masyarakat	N/A	76,46 %	83,74 %	76%	86,03 %	112.977.819.800	88,31 %	114.803.442.594	88,31 %	227.781.262.394	DLH	
		2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup			Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	N/A	81,11 %	81,18 %		73%		74%		75%		DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
			4.1.1.	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	78%	2.597.705.736	80%	2.632.368.391	80%	5.230.074.127	DLH	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target		Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				4.1.1.1. Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	1774 rekomendasi	1578 berkas	1671 berkas	800 berkas	1.600 berkas	1.598.647.171	1.600 berkas	1.619.978.823	1.600 berkas	3.218.625.994	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
				4.1.1.2. Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	84 permohonan	79 izin	95 izin	50 izin	50 izin	406.745.623	50 izin	412.173.060	50 izin	818.918.683	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
				4.1.1.3. Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	64 KU	61 berkas	143 izin	45 izin	45 izin	592.312.942	45 izin	600.216.508	45 izin	1.192.529.450	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Nilai SAKIP	N/A	68,86	70,03	>60-70	>70-80	5.135.507.410	>80-90	5.207.525.799	>80-90	10.343.033.209	DLH	
		3.1. Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan			Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya	N/A	93,60 %	100%	100%	100%	1.624.862.060	100%	1.647.150.855	100%	3.272.012.915	DLH	
			5.1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	67,94 %	82,61 %	76%	87%	1.196.809.895	88%	1.316.490.885	88%	2.513.300.780	DLH	
			5.1.1.1.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	92,51 %	N/A	110%	100%	100%	1.196.809.895	100%	1.316.490.885	100%	2.513.300.780	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			5.1.2.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	100%	99,11 %	100%	100%	428.05 2.165	100%	470.85 7.382	100%	898.90 9.547	DLH	
					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	92,84 %	100,00 %	100%	100%		100%		100%		DLH	
			5.1.1.1.	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	100%	100%	428.05 2.165	100%	470.85 7.382	100%	898.90 9.547	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 660/12596/436-7.12/2019

TANGGAL : 20 AUG 2019

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang
Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Kota Surabaya

Tanggal : 20 Agustus 2019

Tempat : Ruang Rapat DLH Kota Surabaya

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD						Target 2019	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016		2017		2018			2020	2021	
		Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi				
Indikator Tujuan											
1	Indeks Kualitas Air Permukaan	N/A	N/A	51,88	57,5	52,28	57,62	52,68	57,62	57,63	57,63
2	Indeks Kualitas Udara Ambien	N/A	N/A	84,25	90,26	84,5	90,26	84,75	90,27	90,28	90,28
3	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	85%	85%
4	Nilai kepuasan masyarakat	N/A	N/A	76%	76.46%	76%	83.74%	76%	86,03%	88,31%	88,31%
5	Nilai SAKIP	N/A	N/A	>60 - 70	68,86	>60 - 70	70,03	>60 - 70	>70 - 80	>80 - 90	>80 - 90
Indikator Sasaran											
1	Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	50%	50%	60%	63,50%	70%	80%	95%	95%
2	Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	100%	100%
3	tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	N/A	N/A	10KU	11 KU	10KU	11 KU	10 KU	10 KU	10 KU	10 KU

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 660/12596/4367.12/2019

TANGGAL : 20 AUG 2019

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SURABAYA

POKOK BAHASAN : MISI 3 DAN 7

Tanggal : 20 Agustus 2019

Tempat : Ruang Rapat DLH Kota Surabaya

ISU STRATEGIS :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman dan kemampuan pelaku usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan
2. Tidak strategisnya Posisi Surabaya berada di hilir yang berakibat terakumulasinya pencemaran air
3. Sudah adanya SSW yang menaungi perijinan satu pintu
4. Tingginya partisipasi masyarakat dan stakeholder eksternal dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan
5. Semakin banyaknya keberadaan instansi pelatihan SDM lingkungan dan lembaga pengujian udara
6. Masih belum optimalnya Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan lingkungan
7. Masih belum optimalnya Sarana prasarana pendukung operasional
8. Masih belum tersedianya database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK
9. Tersedianya Dasar hukum /kebijakan dan kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan LH dan penerbitan izin TPS LB3 dan Pengumpulan LB3 skala kota
10. Tersedianya SOP pelayanan perizinan dan dokumen Lingkungan Hidup
11. Telah adanya Stasiun monitoring udara ambien
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi
13. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban
14. Sumber pencemar kualitas air sungai di Surabaya berasal dari 60% limbah domestik dan 40% limbah industri
15. Diperlukan adanya ketentuan mengikat yang mengatur persampahan untuk dimasukkan di substansi pengajuan permohonan izin PPLH.
16. Diperlukan integrasi data monitoring kualitas air sungai dari data hasil pemantauan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur
17. Pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga dan UMKM membutuhkan solusi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya
18. Terbatasnya ketersediaan lahan dari warga untuk pembangunan jamban

VISI : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI 3 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air	1. melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan	Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup
		2. Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	
		3. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3	
		4. melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		5. Meningkatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati	
	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	6. membentuk kelompok swadaya masyarakat sebagai alat koordinasi dan pelaksana pembangunan jamban	peningkatan sarana prasarana sanitasi pada kawasan perumahan dan permukiman
		7. penerbitan Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tentang Daftar Calon Penerima Jamban di Kota Surabaya	
		1. melakukan audit energi gedung (gedung pemerintah, dan swasta) dan audit energi proses (di industri)	
2. penerbitan instruksi walikota untuk penerapan penghematan energi di sektor pemerintah Kota Surabaya, BUMD, BUMN, dan swasta			
MISI 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup	mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan terkait lingkungan hidup	Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup melalui pelayanan terpadu
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Menyediakan sarana dan prasarana peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik	peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

**Program Dan Kegiatan Prioritas Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021
Kota Surabaya
Terkait Dengan Pokok Bahasan Misi 3 Dan 7**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Mendorong upaya peningkatan kualitas udara dan air				Indeks Kualitas Air Permukaan	54,9	57,5	57,62	52,68	57,62	8.893.635.628	57,63	9.059.720.137	57,63	17.953.355.765	DLH	kota Surabaya
					Indeks Kualitas Udara Ambien	89,57	90,26	90,26	84,75	90,27		90,28		90,28	DLH		
					Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	80%		85%		85%	DLH		
	1.1. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk menekan pencemaran udara dan air				Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan	N/A	50%	63,50 %	70%	80%		95%		95%	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan	
					Tercapainya pembangunan jamban skala rumah tangga di wilayah kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	62%	85%		100%		100%	DLH	kota Surabaya	
1.1.1.			1.1.1.	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	N/A	50%	63,50 %	70%	80%	3.692.461.395	95%	3.735.332.680	95%	7.427.794.075	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.1.1. Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	N/A	N/A	250 sampel	50 lokasi	178 lokasi	331.42 8.748	178 lokasi	364.57 1.623	178 lokasi	696.00 0.371	DLH	Lokasi IPAL komunal
				1.1.2. Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	54 kasus	67 kasus	50 obyek	50 obyek	539.23 1.848	50 obyek	593.15 5.033	50 obyek	1.132.3 86.881	DLH	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak
				1.1.3. Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	370 sampel	218 sampel	53 KU	254 lembaga	254 lembaga	988.57 5.558	254 lembaga	1.087.4 33.114	254 lembaga	2.076.0 08.672	DLH	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
				1.1.4. Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	58 sampel	NA	NA	224 sampel	224 sampel	400.19 6.499	224 sampel	440.21 6.149	224 sampel	840.41 2.648	DLH	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota Surabaya
				1.1.5. Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat	32 sampel	NA	48 sampel	48 sampel	778 data	461.22 0.572	778 data	507.34 2.629	778 data	968.56 3.201	DLH	Perairan Pesisir di Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target		Target	Rp	Target	Rp			
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			1.1. 1.6.	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	1 unit	N/A	N/A	2 unit	365 data	971.80 8.170	365 data	1.068.9 88.987	365 data	2.040.7 97.157	DLH	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari
			1.1. 2.	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.317.604. 955	100%	3.363.331. 084	100%	6.680.936. 039	DLH	
					Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00 %		75%		75%		DLH	
			1.1. 2.1.	Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	7 dokumen	1.180.1 92.157	7 dokumen	1.298.2 11.373	7 dokumen	2.478.4 03.530	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.1. Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	N/A	N/A	N/A	6 kali	12 kali	706.206.435	12 kali	776.827.079	12 kali	1.483.033.514	DLH	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus
				1.1. 1.3. Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	157 kali	160 kali	151 kali	160 kali	113 kali	1.431.206.363	113 kali	1.574.326.999	113 kali	3.005.533.362	DLH	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kertajaya
				2.1. Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A	1000 lokasi	80%	1.883.569.278	85%	1.961.056.373	85%	3.844.625.651	DLH	kota Surabaya
				2.1. 1. Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	N/A	N/A	N/A	1000 lokasi	400 unit	1.883.569.278	400 unit	1.961.056.373	400 unit	3.844.625.651	DLH	
		1.2. Meningkatkan upaya penerapan			tingkat upaya penerapan konservasi energi pada kegiatan/usaha	N/A	11 KU	11 KU	10 KU	10 KU		10 KU		10 KU		DLH	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						2016	2017	2018		2019	2020		2021		Target			Rp	
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target		Target	Rp	Target	Rp					
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	konservasi energi pada Kegiatan/Usaha	3.1.1.	3.1.1.	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	125 kegiatan dan/atau usaha	245 kegiatan dan/atau usaha	144 kegiatan dan/atau usaha	154 kegiatan dan/atau usaha	552.055.406	164 kegiatan dan/atau usaha	559.604.220	164	1.111.659.626	DLH			
			3.1.1.1.	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan perusahaan konservasi energi	N/A	120 KU	120 KU	120 lembaga	120 lembaga	552.055.406	120 lembaga	607.260.947	120 lembaga	1.159.316.353	DLH			
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		2.1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik lingkup lingkungan hidup	Nilai kepuasan masyarakat	N/A	76,46 %	83,74 %	76%	86,03 %	112.977.819.800	88,31 %	114.803.442.594	88,31 %	227.781.262.394	DLH			
					Tingkat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	N/A	81,11 %	81,18 %		73%		74%		75%		DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya		
					4.1.1.	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	78%	2.597.705.736	80%	2.632.368.391	80%	5.230.074.127	DLH	
					4.1.1.1.	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	1774 rekomendasi	1578 berkas	1671 berkas	800 berkas	1.600 berkas	1.598.647.171	1.600 berkas	1.619.978.823	1.600 berkas	3.218.625.994	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
4.1.1.2.	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	84 permohonan	79 izin	95 izin	50 izin	50 izin	406.745.623	50 izin	412.173.060	50 izin	818.918.683	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya					

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp				
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
				4.1.1.3. Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	64 KU	61 berkas	143 izin	45 izin	45 izin	592.312.942	45 izin	600.216.508	45 izin	1.192.529.450	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya		
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Nilai SAKIP	N/A	68,86	70,03	>60-70	>70-80	5.135.507.410	>80-90	5.207.525.799	>80-90	10.343.033.209	DLH			
						Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya	N/A	93,60 %	100%	100%	100%	1.624.862.060	100%	1.647.150.855	100%	3.272.012.915	DLH		
					5.1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	67,94 %	82,61 %	76%	87%	1.196.809.895	88%	1.316.490.885	88%	2.513.300.780	DLH	
					5.1.1.1.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	92,51 %	N/A	110%	100%	100%	1.196.809.895	100%	1.316.490.885	100%	2.513.300.780	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
					5.1.2.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	100%	99,11 %	100%	100%	428.052.165	100%	470.857.382	100%	898.909.547	DLH	
					Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	92,84 %	100,00 %	100%	100%		100%		100%		DLH			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020		2021		Target	Rp		
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1)			5.1.1.1.	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	100%	100%	428.05 2.165	100%	470.85 7.382	100%	898.90 9.547	DLH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

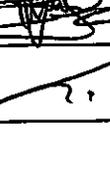
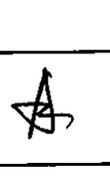
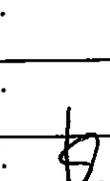
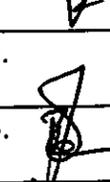
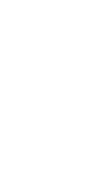
Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

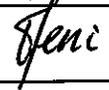
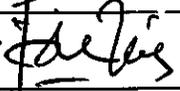
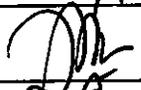
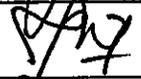
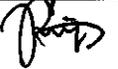
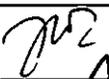
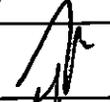
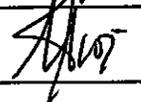
No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1	Menyatukan RPH sehingga sampah hasil pemotongan bisa terkumpul
2	Regulasi desain rusun sesuai jadwal pembuangan jenis waste (padat, dan cair)
3	Program audit energi dan lomba-lomba hemat energi, tindak lanjutnya harus tetap berkelanjutan dan memiliki tolak ukurnya. Dan hendaknya dilakukan kerjasama dengan mahasiswa atau stakeholder lainnya untuk membantu keterbatasan SDM dari DLH dalam melaksanakan kegiatan audit energi, serta menambah alat ukur audit energi.
4	Kendala terkait urusan pembangunan jamban : rumah yang berada di tanah ilegal, dimungkinkan berkoordinasi intensif dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam pelaksanaannya. ITS telah memulai program pembangunan jamban sejak tahun 2017 di Kecamatan Sukolilo.
5	Dari hasil penelitian 60% berasal dari limbah domestik, dan 40% limbah industri. Limbah industri kebanyakan berasal dari industri kertas dimana untuk produksi 1 ton kertas menghasilkan 40m ³ air limbah. Perlu kebijakan pemerintah kota Surabaya untuk mengatur limbah B3 dari rumah tangga dan UMKM, yang pembuangannya nanti bisa dikirim ke PPSLI (pusat pengolahan sampah dan limbah industri) milik DLH Provinsi yang masih dalam rencana pembangunan di wilayah Cendoro. Saat ini PPSLI dalam tahap proses penyusunan AMDAL, Target Operasi : 2 tahun lagi, dengan operator yang ditunjuk adalah JGU
6	Setelah dibangun jamban, maka tugas selanjutnya adalah mengajak masyarakat untuk memiliki jamban yang sehat. Perlu adanya strategi bagi pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat memiliki jamban sehat.
7	Peserta lomba di sekolah-sekolah sudah berupaya mengurangi sampah plastik salah satunya membawa tumbler sendiri. Saran : memberikan apresiasi atas upayanya.
8	Perlu adanya ketentuan yang mengikat yang mengatur persampahan untuk dimasukkan di substansi pengajuan permohonan perizinan PPLH.
9	Perlu adanya regulasi mengenai pengelolaan sampah B3 yaitu sampah spesifik.
10	Bisa dilakukan kolaborasi dengan DKRTH terkait kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan energi alternatif seperti pembuatan briket dari sampah plastik.

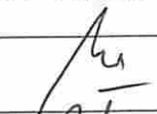
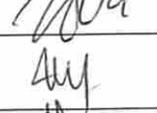
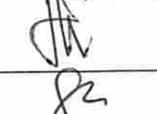
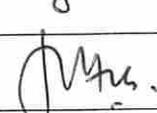
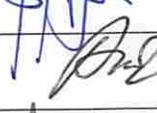
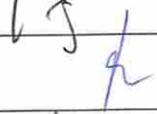
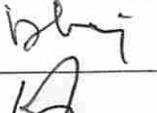
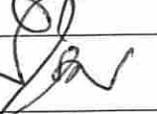
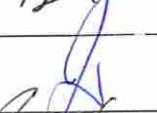
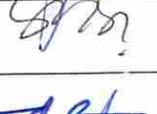
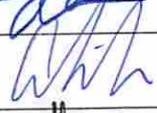
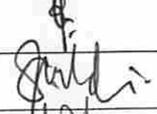
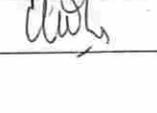
No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
11	Perlu adanya kerjasama dengan DLH terkait pengumpulan data instrumen lingkungan Adiwiyata.
12	Perlu kerjasama terkait penyusunan AMDAL dan perizinan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga
13	Harus dilakukan integrasi data monitoring kualitas air dari data yang dipantau oleh kabupaten/kota di Jawa Timur
14	Saran tambahan isu : kurangnya tingkat kesadaran penduduk permukiman (yang merupakan penyumbang limbah domestik terbesar) terhadap pengelolaan lingkungan
15	Meningkatkan monitoring pengawasan terhadap pencemaran lingkungan
16	3 dari 5 kelurahan di kecamatan Wonocolo belum ODF. Saran : Bagi masyarakat yang mampu dan belum memiliki jamban perlu dilakukan pendekatan lain agar mau membangun jamban sehat.
17	Diperlukan solusi pengelolaan sampah B3 di tingkat kecamatan
18	Kelurahan Morokrengan memiliki banyak warga yang belum ODF karena lokasi rumah yang masuk sempadan sungai.
19	Status tanah di seluruh wilayah Perak Utara milik Pelabuhan dan ada keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan jamban
20	Belum ada dana BOP (Biaya Operasional Penyelenggaraan), sehingga kebutuhan dana untuk operasional dan administrasi masih berasal dari swadaya masyarakat.
21	Himbauan kepada Pemerintah kota untuk membuat Perda yang melarang penggunaan kantong plastik

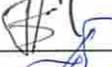
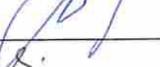
Surabaya, 20 Agustus 2019

Daftar Anggota Sidang Kelompok
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya
Tahun 2019

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
1.	Moh. Nizamudin	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim		1. 
2.		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		2. 
3.	Ryza. C	Badan Perencanaan Pembangunan		3. 
4.	Eko. S	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		4. 
5.	NING SAMI	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	081703670214	5. 
6.	Wahyu. I	Dinas Pendidikan	08155119053	6. 
7.	Febri	Dinas Kesehatan	085745916626	7. 
8.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		8.
9.	ARKA	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	08563383925	9. 
10.		Satuan Polisi Pamong Praja		10.
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	YANNI	Kecamatan Krembangan	081357556394	12. 
13.		Kecamatan Pabean Cantian		13.
14.	Wahjoe. S	Kecamatan Sukomanunggal	Sironulyo I/31	14. 
15.	AMBAR. W	Kecamatan Wonocolo	Jl JEMURAN I-33A	15.

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
16.	M O E D J I ta'at	Kelurahan Perak Utara		16. 
17.	Moch. Anas	Kelurahan Morokrembangan	08993847516	17. 
18.	Sufrizal Yusuf	Kelurahan Simo Mulyo	0812 3218 42	18. 
19.		Kelurahan Jemur Wonosari		19.
20.		Kelurahan Margorejo		20.
21.	Ir. Maz Tri Indrawanto, M. SP	Tenaga ahli perencanaan tatabangunan	085602997510	21. 
22.	AlfanPurnomo, ST, MT	Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan ITS		22. 
23.	ElieserTarigan, Ph. D	Universitas Surabaya		23. 
24.	Fenny	BKM Rukun Abadi	082336540346	24. 
25.		Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia		25.
26.		Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia		26.
27.	Kresnayana Yanyk	Asosiasi Pengelola Koordinator Belanja Indonesia	0811339260	27. 
28.	Firman S	Perum Jasa Tirta I		28. 
29.	Sri	Faskel Korwil Utara	0856 451 65855	29. 
30.	H. Rosikhun	Faskel Korwil Selatan	081 330 372369	30. 
31.	ARUF	Faskel Korwil Barat		31. 
32.	Prahmana Riz	PJT I	081330214696	32. 
33.	RIPKI	Morokrembangan	0899 3847516	33. 
34.	Novi	BKM Rukun ABADI		34. 
35.	Magdalena	BKM Rukun ABADI	081333070716	35. 

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
36.	Chamidha	DUH		36. 
37.	Tiorina	LH		37. 
38.	Okta	PI		38. 
39.	Mymn	DUH		39. 
40.	Sifatuningsih	DUH		40. 
41.	Shinta	DUH		41. 
42.	Justina	LH		42. 
43.	M. Yusuf	DUH		43. 
44.	Dyan P	DUH		44. 
45.	SRI WATONO	LH		45. 
46.	Ulfi	LH		46. 
47.	TRI DRASD	LH		47. 
48.	ENY	DUH		48. 
49.	Dhani	DUH		49. 
50.	Wibowo	DUH		50. 
51.	ELMI. R	DUH PROV		51. 
52.	Ignors	LH		52. 
53.	Rizka	LH		53. 
54.	Dyas	DUH		54. 
55.	Winda	LH		55.
56.	Eko Agus	DUH		56.
57.	Astya W	DUH		57.
58.	Cahyarani	DUH		58.
59.	Sofyan	LH		59.
60.	Pratiwi	LH		60.

No	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN DALAM SIDANG KELOMPOK	TANDA TANGAN
61.	M. FATKHMURROZI	LH		61. 
62.	DJEMBDI	LH		62. 
63.	Bagus	LH		63. 
64.	trius	LH		64. 
65.	SIDAB	LH		65. 
66.	SARIM	LH		66. 
67.	Frans	LH		67. 
68.	Suryo	LH		68. 
69.	ROHMI N	LH		69. 
70.	Elitani	DUH		70. 
71.	Devi S	LH		71. 
72.	Anisena	LH		72. 
73.	wiwim	LH		73. 
74.				74.
75.				75.